

Pengembangan
Kawasan Ekonomi

Wilayah

Teluk Tomini

Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs
di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini

Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs
di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Kawasan Teluk Tomini yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan alamnya, menawarkan peluang yang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap langkah pembangunan ekonomi di kawasan Teluk Tomini memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik, buku ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dinamika pembangunan kawasan, mempertimbangkan tantangan-tantangan serta peluang-peluang yang ada, dan merumuskan strategi-strategi yang dapat mengarahkan pembangunan menuju arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, akademisi, serta pihak-pihak yang tertarik dalam mengambil bagian dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



www.artamedia.co
artamediantara.co@gmail.com
@penerbitanartamedia
@artamediantara

Kepi: 9.123456



Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini



Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini

Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs
di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur



Prof. Karmila Machmud, S.Pd, M.A., Ph.D
Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M
Abdul Hamid Tome, S.H., M.H

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI WILAYAH TELUK TOMINI

**Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs
di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI WILAYAH TELUK TOMINI

Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Prof. Karmila Machmud, S.Pd, M.A., Ph.D
Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M
Abdul Hamid Tome, S.H., M.H



**PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI WILAYAH TELUK TOMINI
Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs di Kabupaten Bolaang
Mangondow Timur**

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Arta Media Nusantara
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Arta Media Nusantara
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI
NO.265/JTE/2023
Cetakan Pertama:
15,5 cm x 23 cm
ISBN**

Penulis:
Prof. Karmila Machmud, S.Pd, M.A., Ph.D
Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M
Abdul Hamid Tome, S.H., M.H

Editor:
Lisnawati

Desain Cover:
Dwi Prasetyo

Tata Letak:
Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Arta Media Nusantara

Jalan Kebocoran, Gang Jalak No. 52, Karangsalam Kidul,
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah
Email: artamediantara.co@gmail.com
Website: <http://artamedia.co/>
Whatsapp : 081-392-189-880

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, kami menghadirkan buku ini sebagai sebuah kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kawasan Teluk Tomini, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pengembangan kawasan ekonomi regional menjadi titik fokus utama dalam konteks pembangunan wilayah ini, yang tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi yang melimpah namun juga menantang dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Buku ini mencoba menggali lebih dalam tentang peluang-peluang yang tersedia seiring dengan pengembangan kawasan ekonomi di Teluk Tomini, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu di atasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional (SDGs) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pembaca, baik mereka yang terlibat langsung dalam proses pembangunan maupun yang memiliki kepentingan dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika pembangunan di kawasan ini.

Penyusunan buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna, baik secara konteks maupun konten. Maka dari itu, penulis membuka diri atas kritik dan saran demi perbaikan ke depan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo atas dukungannya melalui hibah penelitian PNPB. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT. merahmati dan membalas dengan segala kebaikan yang diberikan dan buku ini dapat bermanfaat dalam pengembangan khazanah pengetahuan.

Gorontalo, Maret 2024

Tim Penulis

Prof. Karmila Machmud, S.Pd, M.A., Ph.D
Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M
Abdul Hamid Tome, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDGS)	5
A. Selayang Pandang <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS)	5
B. Indikator-Indikator SDGs	6
BAB 3 MENGENAL WILAYAH TELUK TOMINI BOLAANG MANGONDOW TIMUR	41
A. Aspek Geografi dan Demografi	41
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	44
C. Aspek Pelayanan Umum	53
D. Aspek Daya Saing Daerah	59
E. Gambaran Kondisi Keuangan Daerah.....	67
BAB 4 KEBERHASILAN CAPAIAN INDIKATOR SDGS.....	77
A. Kategori Capaian Indikator SDGs	77
B. Sinkronisasi Indikator SDGs dengan RPJMD dan IKU.....	81
BAB 5 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI	89
A. Prioritas Faktor Pencapaian SDGs	89
B. Prioritas Isu SDGs.....	93
C. Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SDGs.....	96
BAB 6 PENUTUP.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
INDEKS	106
PROFIL PENULIS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, 2023	43
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, 2020 – 2022.....	45
Gambar 3.3	Perbandingan IPM se-Bolmong Raya, 2022.....	46
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Manusia Bolaang Mongondow Timur	47
Gambar 3.5	Tren Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2018-2023	48
Gambar 3.6	Tren Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	49
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, Tahun 2023.....	51
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, Tahun 2023	52
Gambar 3.9	Rasio Guru-Murid dan Guru-Sekolah Bolaang Mongondow Timur	54
Gambar 3.10	Jumlah Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	56
Gambar 3.11	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (km), 2020–2022.....	57
Gambar 3.12.	Akses Terhadap Air Minum Dan Ketersediaan Jamban di Kabupaten Bolaang Mongondow, 2019-2021	58
Gambar 3.13	Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2023	59
Gambar 3.14	Persentase Angkatan Kerja Bolaang Mongondow Timur Menurut Jenis Kelamin, 2022.....	60
Gambar 3.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2023.....	61
Gambar 3.16	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menurut Lapangan Usaha, 2022	62
Gambar 3.17	Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.....	64

Gambar 3.18	Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.....	65
Gambar 3.19	Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2023	68
Gambar 3.20	Perbandingan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2023	71
Gambar 3.21	Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2022	72
Gambar 5.1	Model AHP Prioritas Kriteria Pencapaian SDGs.....	90
Gambar 5.2	Bobot Prioritas Faktor Pendukung Pencapaian SDGs.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, 2023.....	42
Tabel 3.2	Komponen Penyusun IPM Bolaang Mongondow Timur	47
Tabel 3.3	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2022/2023.....	53
Tabel 3.4	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	55
Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran, 2022	63
Tabel 3.6	Struktur Anggaran Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2021-2023	70
Tabel 3.7	Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2021-2023	74
Tabel 4.1	Pemetaan Indikator	78
Tabel 4.2	Capaian Indikator	79
Tabel 4.3	Sinkronisasi Indikator SDGs Kategori D dan E dengan RPJMD dan IKU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ...	83
Tabel 5.1	Penilaian Rata-Rata Geometrik Matriks Perbandingan Kriteria.....	91
Tabel 5.2	Capaian Skor Prioritas Isu SDGs	93
Tabel 5.3	Prioritas Isu SDGs Berdasarkan Faktor Pendukung	94
Tabel 5.4	Bobot Poin <i>Gap</i> Ekspektasi vs Realisasi Implementasi Kebijakan Pencapaian Isu SDGs	97

BAB 1

Pendahuluan

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global. Latar belakang terbentuknya SDGs dapat ditelusuri ke kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 (United Nations, 2012). Sebelum adanya SDGs, terdapat tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang dicanangkan pada tahun 2000 dengan batas waktu pencapaian pada tahun 2015. MDGs fokus pada isu-isu seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, penurunan angka kematian anak, dan upaya melawan penyakit-penyakit tertentu (United Nations, 2015).

Namun, setelah MDGs berakhir pada tahun 2015, terlihat bahwa masih banyak tantangan pembangunan yang perlu di atasi, dan terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan dan mendalami upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, SDGs diadopsi sebagai pengganti MDGs pada tahun 2015 melalui Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk penghapusan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola global (United Nations, 2015). Setiap tujuan memiliki serangkaian target yang spesifik untuk dicapai pada atau sebelum tahun 2030. Latar belakang terbentuknya SDGs adalah untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Sachs, et al, 2019).

Pentingnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi daerah dapat dipahami bahwa SDGs memberikan kerangka kerja yang menye-

luruh bagi daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek-proyek pembangunan yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini memungkinkan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dicapai adalah merata, berkelanjutan, dan memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan SDGs, daerah dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan cara yang berkelanjutan. Misalnya, dengan memerhatikan tujuan SDG terkait dengan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi, daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan kunci yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Implementasi SDGs dapat membantu dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Misalnya, dengan mempromosikan pertanian berkelanjutan dan industri lokal yang ramah lingkungan, daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memerhatikan tujuan-tujuan SDGs terkait dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan krisis, daerah dapat memperkuat sistem-sistem peringatan dini, infrastruktur tangguh, dan kapasitas masyarakat untuk merespons dan pulih dari berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi. Secara keseluruhan, SDGs memberikan landasan penting bagi daerah untuk memandu pembangunan mereka dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dan memperhitungkan tantangan-tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dan di masa depan.

Salah satu daerah Teluk Tomini yang menerapkan *sustainable development goals* adalah Kabupaten Bolaang Mangandow Timur, *sustainable development goals* sangat penting di Kabupaten Bolaang Mangandow Timur untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pencapaian target SDGs, Kabupaten ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan keadilan sosial. Implementasi SDGs dapat menjadi pedoman untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

Daerah yang sudah berdiri sejak tanggal 30 September 2008, wilayah Bolaang Mongondow bagian timur tersebut dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

Walaupun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tergolong baru kabupaten ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki banyak kemajuan dalam segi perekonomian yang dicerminkan dalam angka pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Potensi ekonomi di antaranya pertambangan, pertanian, jasa, dan pariwisata. Saat ini tercatat di Dinas ESDM Kabupaten Boltim, ada tiga lokasi tambang yang resmi beroperasi di Boltim secara legal. Yakni KUD Montang, PT. ASA dan PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM). Selain pertambangan, daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) banyak tersimpan potensi wisata lokal, di wilayah Boltim terdapat beberapa potensi lokasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata, destinasi pariwisata yang pertama dikelola yaitu Danau Mooat.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga terbilang bagus, hal ini ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 senilai 35,32 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang senilai 32,47 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2022 senilai 20,39 triliun Rupiah, dan tahun 2021 senilai 19,38 triliun rupiah. Distribusi PDRB terbesar menurut lapangan usaha berturut-turut di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 39,19 persen, Pertambangan 29,22 persen, dan Perdagangan 9,13 persen (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dikenal dengan kota industri dan merupakan salah satu kota penghasil ikan terbesar di Sulawesi Utara. Sementara distribusi PDRB terbesar menurut pengeluaran berturut-turut adalah pengeluaran rumah tangga, 39,53 persen, pembentukan modal tetap bruto, 29,76 persen dan net ekspor barang dan jasa, 19,01 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tahun 2019 mengalami perlambatan, yaitu 4,19 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,01 persen. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019 terjadi penurunan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. SDGs memberikan panduan bagi

pemerintah kabupaten dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Menerapkan SDGs dapat membantu Kabupaten Bolaang Mangandow Timur untuk fokus pada aspek-aspek penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan lingkungan. SDGs menetapkan target-target khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bolaang Mangandow Timur dapat menggunakan SDGs sebagai panduan untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan, seperti peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perumahan layak. Penerapan SDGs membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kabupaten Bolaang Mangandow Timur dapat memanfaatkan SDGs sebagai platform untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung pencapaian tujuan bersama. Beberapa target SDGs terkait dengan perlindungan lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kabupaten Bolaang Mangandow Timur dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam perencanaan pembangunan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penerapan SDGs dapat memberikan dorongan ekonomi dengan mempromosikan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan. Misalnya, mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada seluruh lapisan masyarakat. Melalui penerapan SDGs, Kabupaten Bolaang Mangandow Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan seimbang, memastikan bahwa perkembangan saat ini tidak merugikan generasi mendatang, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat bermanfaat secara keilmuan, dapat mengembangkan literasi, dan analisis profil kewilayahan yang berbasis SDGs serta inovasi penerapan keilmuan yang sesuai karakteristik permasalahan kewilayahan. Serta bermanfaat secara praktis untuk menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun universitas dalam merumuskan perencanaan daerah yang strategis dan prioritas sesuai karakteristik daerah di kawasan Teluk Tomini untuk mendorong pencapaian target SDGs demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara *sustainable*.

BAB 2

Sustainable Development Goal (SDGS)

A. Selayang Pandang *Sustainable Development Goals* (SDGS)

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa memerhatikan aspek lingkungan yang ada. Akibatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi. Dampak-dampak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan yang terjadi sudah lama dilakukan. Dimulai dari dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Stockholm, Swedia tahun 1972. Dalam konferensi tersebut dicapai kesepakatan tentang hubungan antara masalah lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Sejak saat itu konsep pembangunan yang ramah lingkungan mulai diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan oleh berbagai negara. Pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan.

Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan

dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti SDGs.

Mulai tahun 2016, Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan milenium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan. Salah satunya adalah tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak. Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antarnegara dan antarwarga negara. SDG’s berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang (Hoelman et. Al., 2015).

B. Indikator-Indikator SDGs

Indikator-indikator SDGs di antaranya sebagai berikut.

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan

a. Persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari (PPP)

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari \$1,25 per orang per hari. Ambang batas \$1,25 merupakan ukuran kemiskinan pendapatan ekstrem yang dapat dijadikan standar perbandingan antar negara ketika dikonversi dengan paritas daya beli (PPP) nilai tukar untuk konsumsi. Selain itu, kemiskinan yang diukur berdasarkan garis

kemiskinan internasional memiliki nilai riil konstan garis kemiskinan dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penilaian kemajuan dalam mencapai tujuan pemberantasan kemiskinan ekstrem.

Indikator ini menggunakan sumber data dasar yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) berupa pengeluaran per kapita penduduk. Sejak tahun 1993, informasi mengenai pengeluaran per kapita penduduk sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, BPS dapat menyajikannya untuk tingkat kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan data Susenas KOR (tahun 2008 menggunakan Susenas modul konsumsi. Kemudian mulai tahun 2011, Susenas Konsumsi lengkap dilakukan setiap triwulan. Garis kemiskinan dihitung oleh Bank Dunia setiap setahun sekali sehingga indikator dapat disajikan secara tahunan.

Data Susenas dapat menyajikan karakteristik kepala rumah tangga miskin seperti karakteristik demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Beberapa karakteristik demografi tentang kepala rumah tangga miskin yang dapat dianalisis sesuai dengan ketersediaan data mencakup rata-rata jumlah anggota rumah tangga, wanita sebagai kepala rumah tangga, dan rata-rata usia kepala rumah tangga. Karakteristik pendidikan mencakup rata-rata lama sekolah, kemampuan baca tulis, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga, sedangkan karakteristik ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha atau sektor dan jumlah jam kerja seminggu.

b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan

Indikator MDGs yang dimodifikasi ini didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari jumlah tertentu per orang per bulan. Ambang kemiskinan ini ditentukan pada level nasional di mana seseorang dianggap miskin. Garis kemiskinan nasional harus dibedakan untuk daerah perkotaan dan pedesaan untuk memperhitungkan perbedaan biaya hidup.

Sumber data dasar yang digunakan dan disagregasi data sama dengan indikator sebelumnya. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan nasional BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS melakukan penghitungan kemiskinan setiap bulan Maret dan September dengan

level penyajian sampai dengan provinsi. Penghitungan angka kemiskinan kabupaten/kota dilakukan setahun sekali tanpa membedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan.

c. Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial

Akses terhadap perlindungan sosial yang memadai merupakan hak dasar sebagaimana telah diabadikan dalam Deklarasi Universal HAM, akan tetapi lebih dari setengah penduduk dunia belum tercakup dalam perlindungan sosial. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang tercakup oleh jaringan perlindungan sosial. ILO menetapkan 10 elemen berikut dalam cakupan perlindungan sosial yang komprehensif yaitu pelayanan kesehatan, tunjangan sakit, perlindungan untuk penyandang cacat, lanjut usia, korban, ibu, anak-anak, pengangguran, kecelakaan kerja, dan perlindungan umum terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial. Jenis perlindungan sosial yang paling umum adalah intervensi pasar tenaga kerja untuk mempromosikan pekerjaan dan perlindungan pekerja, asuransi sosial seperti asuransi kesehatan atau pengangguran, dan bantuan sosial untuk mendukung individu atau rumah tangga yang rentan. Instrumen-instrumen perlindungan sosial juga mulai banyak dikenal oleh masyarakat, termasuk bantuan tunai bersyarat.

Bantuan dan perlindungan sosial di Indonesia merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin. Hak dasar tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (TNP2K). Beberapa program perlindungan sosial tersebut adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sumber yang menyediakan data untuk indikator ini adalah Susenas berupa proporsi rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial. Data dikumpulkan rutin setiap tahun sampai level kabupaten/kota. Unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga sehingga data tidak bisa didisagregasi berdasarkan gender dan umur penerima

bantuan. Namun, pada triwulan I tahun 2013, dilakukan Survei Perlindungan Sosial. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengumpulan data perlindungan sosial yang diintegrasikan dengan Susenas. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas program perlindungan sosial yang saat ini sedang berjalan. Data yang dikumpulkan dari survei ini akan dianalisis oleh TNP2K untuk mengukur dampak dari program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan individu, rumah tangga, dan nasional. Oleh karena survei tersebut bisa mengukur cakupan perlindungan sosial individu, maka indikator bisa disagregasi berdasarkan jenis kelamin, umur, dan wilayah kota-desa. Level terendah penyajian data adalah provinsi.

d. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan multidimensi ekstrem

Analisis kemiskinan multidimensi bertujuan untuk mengukur dimensi kemiskinan berbasis nonpendapatan, untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari tingkat kemiskinan dan kekurangan. Beberapa indeks kemiskinan multidimensi yang ada, termasuk alat penilaian kemiskinan multidimensional (*multidimensional poverty assessment tool*) oleh IFAD dan indeks lain yang lebih dikenal luas Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) oleh *Human Development Report Office* UNDP. MPI mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi yaitu kesehatan (angka kematian anak, gizi), pendidikan (lama sekolah, partisipasi), dan standar hidup (bahan bakar untuk memasak, toilet, air, listrik, lantai, aset). Indeks ini mengukur rumah tangga yang mengalami kekurangan di salah satu dimensi dengan menggabungkan pengukuran dimensi tersebut. Pengukuran ini dikritik karena masalah pengelompokan (klaster) dan pembobotan subindikator pada tiga dimensi yang sangat luas. Hasilnya, meskipun seorang individu tidak memiliki akses terhadap air, tidak dapat dianggap miskin jika mereka memiliki tingkat pendidikan dan nutrisi yang cukup. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memastikan konsep SDSN terhadap kemiskinan multidimensi yang secara tegas termaktub dalam Deklarasi Milenium dan MDGs, SDSN mendukung terciptanya indikator baru dengan sedikit revisi. Setidaknya, MPI 2015 ini akan melacak kekurangan ekstrem pada gizi, pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, akses memasak modern dan listrik yang dapat diandalkan, untuk menunjukkan kesinambungan dengan prioritas MDG. Secara

khusus, indikator tersebut akan memperkirakan persentase rumah tangga yang mengalami hal berikut ini:

- a) Kekurangan gizi anak dan dewasa.
- b) Terganggu atau dibatasinya sekolah (minimal 1-8 tahun).
- c) Kematian anak dalam keluarga.
- d) Kurangnya akses terhadap air minum bersih.
- e) Kurangnya akses ke layanan sanitasi dasar.
- f) Kurangnya akses ke solusi memasak modern.
- g) Kehilangan aset dasar yang modern (radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor, mobil).
- h) Kurangnya akses ke listrik yang dapat diandalkan.

Indikator tambahan mungkin bisa mencakup aset pertanian dan kerentanan rumah tangga, termasuk guncangan ekonomi dan korban bencana alam dan/atau kualitas kerja, pemberdayaan, keamanan fisik dan paparan kekerasan, keterhubungan sosial, isolasi sosial, rasa malu dan kesejahteraan psikologis. Meskipun akan lebih baik jika kemiskinan multidimensi ditentukan berdasarkan deprivasi pada salah satu bidang tersebut, MPI sebelumnya telah menemukan abnormalitas jika hanya menggunakan satu deprivasi, sebagian karena penyimpangan yang ditimbulkan oleh norma-norma budaya dan sebagian karena skala deprivasi yang begitu luas. Penentuan tingkat kemiskinan di negara seperti India atas dasar salah satu dari deprivasi ini, akan menghasilkan tingkat kemiskinan di atas 90%, berpotensi membayangi kemajuan-kemajuan yang telah dibuat dalam satu atau lebih bidang. Oleh karena itu, SDSN mengusulkan penggunaan metode penghitungan Alkire dan Foster, serta menetapkan ambang batas dari dua atau lebih deprivasi, untuk menentukan siapa yang dianggap miskin atau tidak miskin. Penetapan ambang ini akan memerlukan diskusi partisipatif serta konsultasi ahli. Ambang batas alternatif juga bisa disesuaikan dengan konteks nasional, seperti yang telah dimiliki Meksiko, Columbia dan Bhutan.

e. Persentase perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki hak atas lahan, yang diukur dengan (i) persentase yang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase yang tidak takut akan penyitaan terhadap lahannya

Mampu tidaknya masyarakat miskin di pedesaan dalam mengamankan kepemilikan mereka atas lahan dan sumber daya alam yang mereka bergantung padanya memberi implikasi penting bagi

pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih banyak rumah tangga miskin di pedesaan yang akses terhadap lahan dan sumber daya alamnya terus digero-goti. Secara khusus, kontroversi yang melibatkan akuisisi lahan dalam skala besar oleh investor asing dan domestik telah menempatkan hak atas lahan dan masalah investasi pertanian yang bertanggung jawab pada agenda pembangunan global. Indikator baru ini diusulkan dengan dua komponen yaitu (i) persentase penduduk yang memiliki sertifikat tanah (ii) persentase penduduk yang tidak takut akan terjadinya perampasan tanah secara sewenang-wenang. Dokumentasi dan wawasan memberikan informasi penting dan berimbang terhadap jaminan kepemilikan serta menjadi bukti penting dan nyata di lapangan. Fokus yang diusulkan-hak yang didokumentasikan cukup fleksibel untuk mencakup berbagai hak kepemilikan dalam konteks yang berbeda di setiap negara. Walaupun pendokumentasian merupakan indikator yang penting, hal itu tidak cukup untuk mengukur hak atas jaminan kepemilikan, ukuran persepsi memberikan informasi tambahan yang juga penting. Selain itu, ukuran persepsi lebih berguna untuk memfasilitasi keterbandingan indikator antarnegara.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas legalisasi aset. Legalisasi aset berupa tanah dilakukan dengan memberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang belum bersertifikat milik oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu. Program legalisasi aset tersebut berupa kegiatan sertifikat tanah prona, petani, nelayan, UKM, transmigrasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengetahui keadaan penduduk miskin di pedesaan atas terjaminnya lahan mereka, indikator proksi yang digunakan berdasarkan ketersediaan data di Indonesia adalah jumlah bidang tanah yang bersertifikat serta perkembangan program legalisasi lahan oleh BPN. Ketersediaan data memungkinkan indikator untuk didisagregasi. Jumlah dan luas tanah bersertifikat dapat didisagregasi berdasarkan jenis hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak wakaf, hak pengelolaan, dan hak pakai. Selain itu, statistik capaian program legalisasi aset dapat dirinci berdasarkan jenis program tersebut seperti sertifikasi PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), tanah UKM, tanah petani, tanah nelayan, tanah transmigrasi, dan tanah masyarakat berpenghasilan

rendah. Belum tersedianya data dan informasi mengenai persepsi masyarakat tentang terjaminnya hak atas tanah menyebabkan ukuran persepsi belum bisa menjadi indikator pada tujuan ini. Oleh karena itu juga, data tidak bisa didisagregasi berdasarkan jenis kelamin pemilik aset.

f. Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut daerah perkotaan pedesaan (dalam satuan US\$ dan jumlah korban jiwa)

Banyak kota di dunia termasuk pedesaan mulai merasakan resiko bahaya bencana alam, seperti berbagai kejadian alam yang berkaitan dengan iklim ekstrem yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi termasuk salah satu pemicu resiko bahaya bencana alam tersebut. Indikator ini mengukur kerugian yang dialami daerah perkotaan maupun pedesaan akibat bencana alam baik jiwa maupun kerugian ekonomi, dibagi atas kejadian terkait iklim dan bukan iklim. Bencana alam yang terjadi akibat iklim ekstrem antara lain, (i) peristiwa hidrometeorologi (badai, banjir, gerakan massa basah) dan (ii) kejadian iklim (suhu ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan). Bencana alam yang tidak terkait iklim terutama berkaitan dengan peristiwa geofisika (gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, gerakan massa kering). Bencana lainnya yang terkait iklim maupun bukan iklim yaitu peristiwa biologis (epidemi, gangguan serangga, animal stampedes). Jika ragu maka dapat dikelompokkan sebagai kejadian yang tidak terkait iklim. Langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana yang efektif diperlukan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari bencana alam, termasuk kejadian iklim ekstrem, pada sektor pertanian dan daerah pedesaan. Dimensi ekonomi dari indikator ini akan mengukur kerugian tanaman dan hewan produksi terkait dengan peristiwa iklim dan non-iklim terkait, terutama dengan memanfaatkan teknologi real-time berupa penginderaan jauh sebagai inti dari resolusi sistem pemantauan pertanian. Indikator juga akan melacak keberhasilan langkah-langkah adaptasi dan kesiapan lainnya di daerah yang paling berisiko, termasuk misalnya, adopsi varietas baru yang toleran terhadap tekanan atau teknologi peningkatan ketahanan lainnya yang meminimalkan risiko kerugian panen. Dimensi kerugian ekonomi lainnya, termasuk nilai kerusakan aset fisik yang hancur secara total atau sebagian, kerugian dalam arus ekonomi yang timbul dari tidak adanya aset yang rusak secara sementara, dampak yang dihasilkan pada

kinerja ekonomi makro pascabencana, dengan referensi khusus untuk pertumbuhan ekonomi/PDB, neraca pembayaran dan situasi fiskal pemerintah, sesuai dengan metodologi penilaian kerusakan dan kerugian yang dikembangkan oleh UN-ECLAC. Kerugian manusia akan diukur dengan jumlah orang meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari bencana alam, dikonfirmasi dengan menggunakan angka resmi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki basis data yang dinamakan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Melalui DIBI dapat dilihat historis kejadian bencana di Indonesia mulai tahun 1815. DIBI juga menyajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan ketersediaan data, indikator dapat didisagregasi berdasarkan jenis bencana (terkait iklim dan noniklim), serta wilayah sampai dengan level kabupaten/kota. Selain itu, korban bencana dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan

a. Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum

Didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami kelaparan atau kekurangan makanan (kalori). Terdapat tiga parameter yang digunakan untuk menghitung indikator ini yaitu (i) Jumlah makanan dalam tiga tahun rata-rata bergerak (*moving average*) yang tersedia untuk konsumsi per orang per hari, (ii) Tingkat kesenjangan akses terhadap makanan dan (iii) Konsumsi energi minimum yang diperlukan seseorang - dinyatakan dalam kilo kalori per hari.

Indikator ketahanan pangan rumah tangga ini dikumpulkan melalui Susenas berupa persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1400 dan 2000 kkal per kapita per hari). Keterbatasan pengumpulan data menyebabkan data yang tersedia belum bisa menjelaskan ketahanan pangan intra-rumah tangga, sehingga disparitas akses pangan penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak bisa diketahui.

b. Persentase penduduk yang kekurangan salah satu dari mikronutrien (vitamin dan mineral): zat besi, zink, yodium, vitamin A, folat, dan vitamin B12

Mikronutrien itu penting untuk kesehatan, namun kekurangan satu atau lebih mikronutrien sering terjadi di beberapa daerah, dengan pola makan dan kemiskinan menjadi faktor pendorong. Kekurangan mikronutrien dapat menyengsarakan ibu hamil dan anak-anak, karena kekurangan mikronutrien dapat berdampak seumur hidup. Terdapat enam mikronutrien yang paling sering terjadi kekurangan antara lain, mineral besi, seng, dan yodium, dan vitamin A, B12, dan folat. Indikator yang dapat menghitung kekurangan ini pada skala global perlu dikembangkan. Struktur dan komposisi indikator perlu dikembangkan atas dasar kajian menyeluruh dari data yang tersedia tentang mikronutrien dan peluang untuk skala pengumpulan data berdasarkan MDGs. Tujuannya adalah untuk menangkap setiap orang yang menderita kekurangan mikronutrien, bukan hanya kekurangan zat besi (anemia) seperti pada MDGs. Beberapa ahli menyarankan bahwa vitamin D ditambahkan dalam daftar ini. Pertanyaan ini perlu diselesaikan sebelum indikator ini tercakup dalam kerangka monitoring pasca-2015. Indikator komplementer pada defisiensi mikronutrien adalah anemia pada wanita yang tidak hamil.

c. Prevalensi balita dengan keadaan stunting (tinggi badan kurang)

Indikator ini mengukur persentase balita usia dua tahun atau lebih yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari malnutrisi kronis. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak.

Prevalensi balita stunting/pendek merupakan salah satu indikator yang diperoleh dari Riskesdas. Data tinggi badan pada Riskesdas menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut: ● Sangat pendek:

Zscore < -3,0 ● Pendek: Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0 ● Normal: Zscore $\leq$ -2,0 Data tersedia sampai dengan level provinsi. Disagregasi data dapat berdasarkan wilayah kota desa, jenis kelamin dan pendapatan rumah tangga.

d. Kesenjangan hasil panen pertanian (persentase hasil panen sebenarnya dibanding hasil panen potensial)

Indikator ini menelusuri kesenjangan hasil panen untuk komoditas utama, yaitu perbandingan jumlah panen yang dihasilkan terhadap hasil panen yang dapat dicapai pada kondisi manajemen yang baik, dengan mempertimbangkan iklim dan pemanfaatan air berkelanjutan (misalnya potensi hasil panen pada saat keterbatasan air). Negara bisa menetapkan kebijakan terkait, seperti untuk mencapai setidaknya 80 persen dari potensi hasil panen yang dapat dicapai dengan efisiensi air secara berkelanjutan, dan mengharuskan penerapan roadmap kebijakan dan teknologi yang tepat.

Indikator ini dapat diartikan sebagai perbandingan realisasi hasil produksi tanaman pangan yang terjadi terhadap target produksi yang ditentukan. Komoditas tanaman pangan pada indikator ini adalah tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Tanaman pangan utama tersebut merupakan komoditas strategis dan prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Data produksi aktual tanaman pangan disediakan oleh BPS dari Survei Ubinan yang dimulai tahun 1968 dan dilaksanakan rutin setiap empat bulan sekali, sedangkan target produksi ditentukan dalam program lima tahunan Kementan. Ketersediaan data memungkinkan indikator didisagregasi berdasarkan jenis tanaman pangan prioritas dan berdasarkan wilayah, nasional maupun provinsi.

e. Jumlah petugas penyuluh pertanian per 1000 petani (atau proporsi petani yang tercakup dalam program dan layanan penyuluhan pertanian)

Untuk meningkatkan hasil pertanian berkelanjutan di semua daerah, tidak akan mungkin terjadi tanpa berfungsinya sistem penyuluhan pertanian publik dan atau swasta. Indikator yang diusulkan telah dikembangkan oleh FAO yang menelusuri jumlah profesional pertanian yang berkualitas di berbagai sektor yang memberikan pelatihan, informasi, dan dukungan penyuluhan dan jasa lainnya kepada para petani dan usaha kecil dan menengah dalam rantai nilai pedesaan.

Rekapitulasi jumlah penyuluh pertanian tercatat setiap tahunnya oleh Kementan sampai pada level kabupaten. Penyuluh pertanian terdiri dari PNS, tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), dan honorer. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya satu penyuluh untuk setiap desa potensi pertanian. Berdasarkan ketersediaan data, indikator dapat dirinci menurut provinsi untuk memantau ketersediaan penyuluh di tiap desa, kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, jenjang jabatan, subsektor, dan usia penyuluh pertanian. Indikator lain yaitu persentase petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian dapat diperoleh dari Survei Pendapatan Petani (SPP) yang merupakan kelanjutan dari Sensus Pertanian (ST) dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Data bisa dirinci sampai dengan level kabupaten/kota, selain itu juga dapat dirinci berdasarkan jenis penyuluhan yang diikuti seperti budidaya, pengolahan hasil, pemasaran hasil, dan lainnya. Karena hanya dikumpulkan setiap sepuluh tahun sekali, perkembangan indikator tidak bisa dilihat secara jangka pendek.

f. Efisiensi penggunaan pupuk nitrogen

Nitrogen memainkan peran sentral pada produktivitas, keberlanjutan dan dampak lingkungan dari sistem pangan. Sebagian besar nitrogen antropogenik yang dihasilkan masuk ke siklus global sebagai pupuk dalam produksi pertanian. Oleh karena itu, mengoptimalkan pengelolaan sehingga tercapainya hasil panen yang tinggi dengan efisiensi pupuk nitrogen yang tinggi pula merupakan komponen inti dari ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan. Indikator ini merupakan rasio nitrogen dalam produk tanaman yang dipanen dengan jumlah nitrogen yang diterapkan per musim tanam atau tahun. Hal ini berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan pupuk di lahan pertanian, termasuk teknologi baru dan program pengelolaan para petani dan penasehat. Target efisiensi penggunaan tanaman nitrogen adalah spesifik pada suatu konteks, terutama tergantung pada iklim, hasil, penggunaan nitrogen saat ini, kualitas tanah, irigasi, dan praktik-praktik pengelolaan tanaman lainnya. Indikator ini harus diinterpretasikan dengan indikator lain yang berhubungan, seperti indikator hasil panen dan indikator produktivitas air. Berbagai kemungkinan target untuk indikator ini adalah meningkatnya efisiensi pupuk nitrogen sebesar 30 persen dibandingkan dengan level saat ini

di negara-negara yang efisiensinya jauh di bawah level yang dapat dicapai dengan pengelolaan unsur hara yang baik dan penatagunaan. Organisasi internasional dan regional, industri pupuk, dan komunitas ilmiah harus bekerja sama untuk memperbaiki indikator ini. Dibutuhkan perbaikan sistem pengumpulan data yang diperlukan dengan dua cara yaitu (i) statistik tahunan mengenai penggunaan unsur hara dan penghapusan tanaman/crop removal di tingkat sub-nasional dan menurut jenis (pupuk dan sumber nutrisi lainnya), dan (ii) monitoring lapangan secara teratur mengenai efisiensi penggunaan nitrogen dan indikator lain yang berhubungan dengan zat hara (misalnya kesuburan tanah, praktik manajemen untuk pengelolaan zat hara yang lebih baik).

g. Kerugian besar akibat nitrogen reaktif dan fosfor terhadap lingkungan

Pupuk nitrogen dan fosfor sangat penting untuk sistem pertanian tanaman pangan populasi dunia. Pupuk tersebut penting untuk pertanian yang intensif, sehingga membatasi konversi lahan untuk pertanian. Kedua zat hara tersebut akan memainkan peran penting dalam mencapai SDGs. Terdapat perbedaan besar di antara dan di dalam negara-negara pada siklus hara. Sementara beberapa daerah terutama Sub-Sahara Afrika – yang menggunakan nitrogen dan fosfor yang terlalu sedikit terjadi kehabisan zat hara tanah. Di negara yang lain mengalami kerugian akibat nitrogen dan fosfor yang berlebihan terutama dari pertanian dan peternakan, pembakaran bahan bakar, limbah, dan kegiatan lainnya. Arus nitrogen yang berlebihan tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekosistem utama dan bioma, khususnya di perairan, yang berdampak pada skala regional dan global. Sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan internasional bersama untuk mempromosikan praktik pengelolaan terbaik tanpa mengurangi produktivitas pertanian. Cara utama untuk mengurangi kehilangan unsur hara tanpa mengurangi produktivitas pertanian dan kualitas tanah adalah penerapan penggunaan zat hara tanaman yang efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa indikator. SDSN mengusulkan untuk mendefinisikan indikator pelengkap untuk memantau beban nutrisi yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada fungsi ekosistem.

h. Akses terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan

Infrastruktur pengeringan dan penyimpanan hasil pertanian yang baik sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kontaminasi oleh mikotoksin, serangga, atau kontaminan makanan lainnya. Fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan juga meningkatkan pendapatan petani dengan memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk menjual hasil panen mereka dan menunggu tingkat harga yang baik. Perluasan kapasitas pengolahan di pedesaan dapat menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan akses ke pasar, dan memfasilitasi nilai tambah (termasuk produksi makanan untuk meningkatkan gizi bayi/anak dan mengurangi pekerjaan ibu yang membosankan). Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator yang mengestimasi akses ke fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan.

i. Perubahan tahunan lahan rusak atau yang menjadi gurun (% atau ha)

FAO mendefinisikan degradasi lahan sebagai pengurangan kondisi tanah, yang memengaruhi kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa ekosistem dan untuk menjamin fungsinya selama periode waktu. Komponen degradasi lahan meliputi salinisasi, erosi, hilangnya nutrisi tanah, dan gundukan pasir perambahan. Data degradasi lahan secara terus menerus ditingkatkan melalui kemajuan dalam penginderaan jauh, pemetaan digital, dan monitoring. Tujuan utama harus menghentikan semua degradasi lahan bersih pada tahun 2030.

Indikator untuk mengetahui kejadian degradasi dan desertifikasi tanah dapat didekati dengan luas lahan kritis. Desertifikasi atau penggurunan adalah salah satu proses yang dapat menyebabkan lahan terdegradasi. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan menjadi sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal. Data lahan kritis dicatat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), tersedia mulai tahun 2000, kemudian diperbarui pada tahun 2006, 2010, dan 2011. Berdasarkan ketersediaan data, lahan kritis dapat dirinci berdasarkan wilayah pada level provinsi. Selain itu

dapat juga dirinci berdasarkan tingkat kekritisan lahan, yaitu agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Namun, data lahan kritis yang tersedia tidak rutin diperbarui setiap tahun sehingga perubahan tahunan sulit dideteksi.

j. Produktivitas air tanaman (hasil panen (ton) per satuan air irigasi (m³))/perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan jumlah air yang diberikan terhadap tanaman

Indikator yang diusulkan ini secara langsung berkaitan dengan air tawar yang digunakan untuk irigasi. Pada Sistem Neraca Ekonomi-Lingkungan (SEEA), produktivitas air didefinisikan sebagai nilai tambah pertanian dibagi dengan penggunaan air oleh pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendefinisikan indikator ini.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia

a. Angka kematian neonatal, bayi, dan balita

Angka kematian balita adalah probabilitas bagi seorang anak untuk meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, jika merujuk pada angka kematian spesifik usia saat ini. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan lebih dari 90 persen kematian global di antara anak-anak di bawah usia 18 tahun. Data kejadian penyakit seringkali tidak tersedia, sehingga yang digunakan adalah data angka kematian.

b. Rasio dan angka kematian ibu

Rasio kematian ibu adalah jumlah kematian ibu per tahun dari penyebab yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab-sebab karena kecelakaan atau alasan insidental) yang terjadi selama kehamilan dan persalinan atau dalam 42 hari dari terminasi kehamilan, per 100.000 kelahiran per tahun. Indikator ini mencerminkan kapasitas sistem kesehatan untuk mencegah dan mengatasi komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan secara efektif. Indikator ini juga menyoroti kurangnya asupan gizi dan kesehatan perempuan secara umum dan mencerminkan kurangnya pemenuhan hak reproduksi mereka sehingga menyebabkan kehamilan yang buruk dan berulang. Tingkat kematian ibu adalah jumlah kematian ibu di suatu populasi dibagi dengan jumlah wanita usia reproduksi. Hal ini menangkap kemungkinan hamil dan

meninggal selama kehamilan (termasuk kematian sampai enam minggu setelah melahirkan).

Indikator kematian ibu yang ada di Indonesia dan yang terkenal adalah rasio kematian ibu yang dinamakan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Data AKI dapat diproyeksi setiap tahunnya sampai dengan level provinsi. Disagregasi data AKI dapat dilakukan berdasarkan umur, wilayah (perkotaan dan perdesaan), dan tingkat pendapatan.

c. Prevalensi, angka pengobatan dan angka kematian HIV

Indikator ini mengukur jumlah individu dengan kelompok usia yang hidup dengan HIV, yang dinyatakan dengan persentase terhadap total penduduk pada kelompok usia, serta tingkat pengobatan dengan terapi antiretroviral menurut kelompok usia tertentu. Indikator ini menggambarkan kemajuan dalam mengurangi infeksi HIV dan meningkatkan akses terhadap pengobatan. Indikator pengobatan menggambarkan persentase penduduk di setiap kelompok umur dengan HIV saat ini yang menerima terapi antiretroviral (ART), yang terdiri dari penggunaan setidaknya tiga antiretroviral (ARV), yang secara maksimal menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit. Indikator ini juga menambahkan gambaran kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS.

Prevalensi kasus HIV AIDS dihitung dengan menggunakan informasi data kasus baru dan kasus kumulatif HIV AIDS. Indikator perkembangan kasus AIDS ini dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan yang terdeteksi dari berbagai sarana kesehatan di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Berdasarkan survei STBP, prevalensi dapat didisagregasi menurut kelompok penduduk berisiko tinggi.

Indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pengobatan HIV dan tersedia di Indonesia adalah proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral (ARV). Data dikumpulkan oleh Kemenkes dari berbagai sarana kesehatan setiap tahun. Indikator dapat dirinci berdasarkan jenis terapi ARV (ART lini 1 dan lini 2), wilayah (kabupaten/kota), umur, dan jenis kelamin. Data kematian AIDS yang dilaporkan tercatat di berbagai sarana kesehatan di Indonesia. Data tersedia setiap tahun. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota.

d. Insiden, prevalensi, dan angka kematian terkait TBC

Angka kejadian TB adalah jumlah kasus baru TB per 100.000 orang per tahun. Prevalensi adalah jumlah kasus TB dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu per 100.000. Angka kematian TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB per 100.000 dalam satu tahun. Mendeteksi dan menyembuhkan TB merupakan tindakan yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Prevalensi dan kematian merupakan penanda yang lebih sensitif dari beban tuberkulosis yang berubah-ubah dari kasus baru, namun data insiden TB lebih komprehensif dan memberikan gambaran terbaik dari dampak penanggulangan TB di dunia.

Data untuk indikator kasus TB di atas diperoleh dari laporan TB Global oleh WHO pada level nasional setiap tahun. WHO mengestimasi indikator tersebut berdasarkan data kasus TB yang dilaporkan dengan melakukan konsultasi bersama negara yang bersangkutan. Pada indikator tersebut diperoleh informasi pengidap TB yang juga terinfeksi HIV. Data Prevalensi TB Paru juga dapat diperoleh dari Riskesdas. Data prevalensi dari Riskesdas tersedia sampai level provinsi dan dapat dirinci berdasarkan wilayah kota-desi, dan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Informasi mengenai kasus TB dapat juga diperoleh dengan menggunakan indikator Proporsi pasien TB Paru BTA+ di antara suspek yang diperiksa, Angka penemuan kasus TB Paru BTA+ (Case Detection Rate (CDR)), dan Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate (SR)) yang dikumpulkan Kemenkes secara pencatatan yang tersedia sampai wilayah kabupaten/kota tetapi tidak bisa dirinci secara lengkap berdasarkan karakteristik penderita.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua

a. Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas

Indikator ini mengukur persentase anak-anak kelompok usia 36-59 bulan yang terdaftar dalam program anak usia dini. Program didefinisikan cukup luas mulai dari perawatan/pengasuhan privat atau berkelompok sampai program pra sekolah yang formal. Indikator ini penting untuk mengukur perkembangan anak. Keikutsertaan pada pendidikan pra sekolah yang berkualitas tinggi setidaknya satu tahun memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan

positif pada perkembangan anak. Dalam jangka pendek, keterampilan kognitif awal, seperti keterampilan membaca dan matematika, secara positif dipengaruhi oleh pendidikan anak usia dini. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, akses ke kualitas pendidikan prasekolah meningkatkan proporsi siswa yang masuk sekolah dasar tepat waktu. Tingginya kualitas prasekolah dapat menghasilkan manfaat seumur hidup bagi masyarakat, dengan efek positif diamati pada akhir tahun sekolah, akhir sekolah menengah, berkurangnya kejahatan, mengurangi kehamilan dini, dan meningkatkan pendapatan. Hasil ini mencakup program skala kecil dan skala besar, dan bertanggung jawab atas rasio manfaat dan biaya untuk prasekolah (6 tahun ke atas, di negara-negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah). Pendidikan anak usia dini bermanfaat bagi semua anak, tidak peduli latar belakang ekonomi mereka, tetapi seperti banyak layanan pengembangan anak usia dini lainnya, orang-orang dari latar belakang yang kurang beruntung memperoleh manfaat yang paling banyak.

Di Indonesia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah untuk anak usia 0-6 tahun karena usia SD adalah 7-12 tahun. Indikator ini diperoleh melalui Susenas untuk anggota rumah tangga usia 0-6 tahun berupa pertanyaan pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah yang dimaksud adalah TK/BA/RA, kelompok bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/posyandu, dan lembaga lainnya. Data bisa didisagregasi berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, wilayah, dan pendapatan rumah tangga.

b. Angka kelulusan pendidikan dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang masuk kelas 1 dan telah menamatkan sekolah dasar. Penyelesaian pendidikan dasar diukur dengan angka masukan kasar terhadap kelas akhir pendidikan dasar yaitu angka total pendatang baru di kelas akhir pendidikan dasar (berdasarkan ISCED97 atau *International Standard Classification of Education*), tanpa memandang umur, yang dinyatakan dengan persentase penduduk pada usia yang sesuai dengan kelas terakhir di sekolah dasar (*Gross Intake Ratio to Last Grade of Primary School*). Pendidikan dasar didefinisikan oleh ISCED97 sebagai program yang didesain pada unit atau proyek dasar yang diberikan pada siswa sebagai sebuah pendidikan dasar dalam membaca, menulis dan matematika bersama dengan pemahaman dasar mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan

musik. Rasio masukan kasar di kelas terakhir SD dari laporan utama pada akses utama ke kelas terakhir saat ini, berasal dari tahun-tahun sekolah sebelumnya dan kebijakan pendidikan masa lalu. Indikator ini adalah ukuran siswa pertama kali menyelesaikan pendidikan dasar, karena tidak termasuk siswa mengulang kelas terakhir. Tingginya rasio masukan kasar kelas terakhir menunjukkan tingginya penyelesaian pendidikan dasar. Karena perhitungan ini mencakup semua pendatang baru untuk kelas terakhir (tanpa memandang usia), rasio masukan kasar dapat melebihi 100 persen, karena memasukkan murid yang di atas atau di bawah umur yang memasuki kelas terakhir sekolah dasar untuk pertama kalinya.

c. Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan kelas akhir pendidikan sekolah dasar. Dihitung dengan membagi jumlah siswa di kelas akhir sekolah dasar yang telah dikurangi dengan siswa tinggal kelas, dengan jumlah total siswa usia lulus resmi. Indikator ini bertujuan untuk menangkap angka putus sekolah selama sekolah dasar dan selama transisi sekolah dasar ke sekolah menengah dengan menggunakan pembagiannya yaitu jumlah total siswa dengan usia lulus resmi. Angka kelulusan sekolah menengah penting untuk diukur karena angka putus sekolah tertinggi berada pada kelas menengah pertama. Sebab pada usia-usia tersebut, biaya aktual dan biaya pendidikan menjadi lebih tinggi sementara sistem pendidikan masih berjuang memperbaiki kualitas pendidikan. Serta terdapat perbedaan gender di mana keinginan anak perempuan untuk sekolah sangat ditentukan oleh pendapatan dan biaya pendidikan yang berbeda perlakuannya dengan anak laki-laki, dan masih banyak rumah tangga yang tidak mau berinvestasi untuk pendidikan anak perempuan disebabkan keuntungan (*return*) ekonomi yang tidak akan setara dan tidak langsung. Selain itu, paradigma masyarakat masih terpusat pada peran anak perempuan yang hanya akan dianggap sebagai istri dan ibu.

d. Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki

Indikator ini mengukur total pendaftaran di pendidikan tinggi tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk kelompok usia lima tahun sebagai lanjutan dari tamat

sekolah menengah. Pendidikan tinggi didefinisikan sebagai Klasifikasi Baku Pendidikan Internasional (1997) tingkat 5 dan 6. Angka partisipasi perguruan tinggi adalah indikasi dari kualitas angkatan kerja di negara ini, dan kesenjangan yang besar antara angka partisipasi perguruan tinggi dan tingkat pengangguran mengindikasikan apakah ketidakmampuan ekonomi dalam menyerap lulusan yang terlatih, atau kelayakan kerja para lulusan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang disampaikan melalui sistem perguruan tinggi dengan keterampilan yang dituntut oleh pasar.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

a. Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. Global Burden of Disease mengestimasi bahwa lebih dari 30 persen perempuan di atas 15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran. Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan time lag 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan resiko kekerasan dari waktu ke waktu dibanding dengan pengukuran menggunakan time lag seumur hidup.

Saat ini, data prevalensi kekerasan yang rutin dikumpulkan oleh BPS menggunakan pendekatan persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Pendekatan tersebut kurang rinci sehingga belum tepat untuk indikator 40 ini. Survei ad-hoc yang pernah dilakukan untuk melihat gambaran kekerasan adalah survei berbasis rumah tangga yang terintegrasi dengan Susenas yang disebut Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian PPA. Responden adalah semua

perempuan yang berusia 18 tahun ke atas atau perempuan berusia di bawah 18 tahun yang pernah menikah. Hasil survei dapat menyajikan data secara nasional maupun pada level provinsi. Kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat dirinci berdasarkan usia, status perkawinan, wilayah kota/desa, dan jenis tindak kekerasan yang dialami (kekerasan penghinaan, penganiayaan, penelantaran, seksual, dan lainnya).

b. Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun

Indikator ini mengukur prevalensi pernikahan dini seperti yang diterangkan oleh UNICEF. Pernikahan dini merupakan pelanggaran HAM dan dapat menimbulkan kerusakan seumur hidup. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah cepat banyak yang meninggalkan pendidikan formal dan sering mengalami kehamilan berisiko tinggi. Pengantin perempuannya juga berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi dan pemisahan oleh keluarga dan teman-teman yang dapat berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan.

c. Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/atau daerah

Indikator MDGs yang dimodifikasi ini digunakan untuk mengukur rasio persentase kursi yang diduduki perempuan dan kaum minoritas (termasuk masyarakat adat) di badan legislatif (nasional, regional, lokal) dibagi berdasarkan populasi masing-masing. Kaum minoritas yang dimaksud adalah kelompok yang secara jumlah lebih sedikit dibanding jumlah seluruh penduduk di suatu negara, berada dalam posisi non-dominan, yang anggotanya – menjadi warga negara di suatu negara, memiliki karakteristik etnis khusus, agama atau bahasa yang berbeda dari penduduk seluruh populasi serta menunjukkan secara implisit rasa solidaritas, yang ditujukan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka. Hal ini menunjukkan sejauh mana perempuan dan kaum minoritas memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dan kaum minoritas dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan mereka di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan dan kaum minoritas.

6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan

a. Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan pedesaan yang mengakses layanan dasar terhadap air minum, seperti yang dijelaskan dalam program monitoring gabungan WHO/UNICEF. Air minum adalah air yang digunakan oleh manusia untuk konsumsi, persiapan makanan, dan kebutuhan kebersihan dasar lainnya. Rumah tangga dianggap memiliki layanan dasar terhadap air minum ketika mereka menggunakan air dari sumber yang layak dalam kurun waktu total 30 menit atau kurang untuk satu putaran, termasuk antriannya. Sumber air minum yang layak adalah sumber atau titik penampungan air dari alam atau terlindung dari kontaminasi. Sumber air minum yang layak meliputi, pipa pasokan air minum lokal, kran umum, tabung penampung, sumur galian, mata air terlindung, air hujan, dan air minum kemasan (sumber yang layak digunakan untuk mencuci tangan, memasak atau tujuan kebersihan lainnya). Kekurangan air minum yang aman merupakan penyebab utama penyakit dan kematian, karena infeksi virus, polusi kimia dan kebersihan yang buruk. Kurangnya akses air di dalam rumah merupakan bentuk kerugian ekonomi, karena dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengambil dan membawa air. Indikator ini menyediakan proksi untuk mengukur paparan akses terhadap air minum yang aman dan tindakan efektif untuk mengaksesnya.

BPS menyediakan indikator akses air minum layak dari Susenas. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator yang digunakan adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator dapat dirinci menurut daerah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan).

b. Persentase pengolahan aliran air limbah sesuai standar nasional, menurut sumber rumah tangga dan industri

Kurangnya pengelolaan limbah domestik dan industri menimbulkan bahaya kesehatan dan lingkungan yang serius di banyak kota, khususnya di negara sedang berkembang di mana 80-90 persen limbah perkotaan tidak ditangani dengan tepat. Bahkan di negara maju, limbah belum ditangani secara keseluruhan. Tingkat limbah secara global terus meningkat secara eksponensial sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Besarnya volume limbah yang tidak ditangani langsung saja dibuang ke berbagai sumber air, dan mengancam kesehatan manusia, ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber air. Oleh karenanya indikator ini diusulkan untuk memantau penanganan limbah pasca-2015. Terdapat banyak cara untuk mendefinisikan limbah. Secara garis besar, limbah merupakan kombinasi satu atau lebih limbah domestik yang terdiri dari air hitam (kotoran, urin dan lumpur tinja) dan air abu-abu (limbah dapur dan kamar mandi), air dari perusahaan dan institusi komersial, termasuk rumah sakit, limbah industri, air hujan, dan limbah kota lainnya, pertanian, hortikultura dan limbah budidaya. Penanganan limbah adalah proses memisahkan limbah tersuspensi dan terlarut baik terkontaminasi bahan fisika, kimia maupun biologi untuk menghasilkan, (a) air yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali (b) lumpur padat yang dapat dibuang maupun digunakan kembali (misal pupuk). Penggunaan teknologi canggih memungkinkan untuk menggunakan kembali air yang telah diolah untuk pertanian, industri atau air minum.

Penyajian data untuk indikator ini merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup sebagai ukuran yang dapat digunakan untuk memantau setiap industri maupun instansi/ badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, berdasarkan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, data pengolahan limbah masih minim sehingga dibutuhkan data yang lengkap dan tersedia secara nasional maupun regional sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern

a. Proporsi penduduk dengan akses terhadap solusi memasak modern, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil non-solid untuk memasak, yang didefinisikan dalam laporan kerangka kerja *Sustainable Energy for All* (SE4All). Basis data yang tersedia saat ini (termasuk basis data energi yang digunakan rumah tangga secara global milik WHO dan statistik dan keseimbangan energi dunia milik IEA) hanya menelusuri akses secara biner (rumah tangga yang punya atau tidak punya akses). Hal itu menyebabkan SE4All menggunakan definisi sederhana tersebut sebagai titik awal untuk menelusuri akses solusi memasak modern. Meskipun pendekatan biner ini memenuhi kebutuhan penelusuran global, namun konsensus yang berkembang menuntut kemajuan yang berkelanjutan.

Tentu saja, mendefinisikan akses solusi memasak modern dengan menggunakan proporsi penduduk yang mengandalkan bahan bakar fosil non solid untuk memasak, mengabaikan peran penggunaan kompor masak. Namun indikator tersebut dapat menentukan Tingkat efisiensi, polusi dan keamanan praktik memasak yang ada dalam masyarakat. Selain itu, kebiasaan kegiatan memasak dan karakteristik perumahan juga akan memengaruhi performa solusi memasak di rumah tangga.

Untuk alasan ini SE4All berencana menggunakan matriks berlapis untuk menelusuri akses kesolusi memasak modern. Matriks ini akan mengukur akses tersebut melalui performa Solusi memasak utama (termasuk bahan bakar dan kompor masak) dan menilai bagaimana kecocokan solusi ini dengan kehidupan sehari-hari. Matriks ini juga mencakup pertimbangan polusi udara dalam ruangan/ventilasi dan minyak tanah untuk memasak/pencahayaan. Pengukuran akses kesolusi memasak modern juga menyajikan kemungkinan untuk meningkatkan kesehatan rumah tangga miskin, khususnya perempuan dan anak perempuan yang umumnya bertanggung jawab untuk urusan dapur.

Susenas menyediakan data rumah tangga dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN, listrik non-PLN, petromak/aladin, pelita/ sentir/obor, dan lainnya. Akses listrik yang dapat diandalkan dapat diukur dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non-PLN. Data dapat dirinci menurut wilayah kota-desa dan jenis kelamin KRT.

b. Insentif implisit untuk energi rendah karbon pada sektor listrik (dihitung dalam US\$/MWh atau US\$ per ton CO₂ yang harus dihindari)

Untuk mengurangi emisi GRK ke level optimal secara sosial, biaya sosial emisi GRK perlu diterapkan, yang pada gilirannya memerlukan kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga karbon dalam rentang ukuran tertentu, namun kebijakan ini tidak terbatas hanya pada peraturan, pajak, atau pasar karbon. Indikator ini mengukur tingkat harga karbon (dalam \$/tCO₂e) yang efektif di sektor listrik, seperti yang didefinisikan oleh laporan OECD tentang harga karbon yang efektif, sebagai biaya bersih bagi masyarakat untuk setiap unit pengurangan GRK terinduksi. Definisi yang hampir sama diusulkan oleh laporan Komisi Produktivitas Australia tentang kebijakan emisi karbon di perekonomian penting.

Harga karbon bisa eksplisit seperti pajak karbon atau harga tunjangan emisi dalam sistem perdagangan emisi GRK, atau dapat menjadi implisit, yaitu harga karbon yang mencerminkan biaya untuk masyarakat per ton CO₂e yang berkurang sebagai akibat dari setiap jenis tindakan kebijakan yang memiliki dampak terhadap emisi GRK. Perbandingan harga efektif karbon berdasarkan kebijakan pada sektor dan negara yang berbeda memberikan pemahaman mengenai adanya insentif untuk mengurangi emisi dan adanya efektivitas biaya dari kebijakan alternatif untuk mengurangi emisi, dan dampak potensialnya terhadap daya saing. Hasil numerik dari perbandingan ini harus diperlakukan dengan hati-hati, karena harga satu karbon tidak bisa secara komprehensif dapat menangkap apa yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

Sebagai titik awal, SDSN mengusulkan bahwa kerangka pasca-2015 dapat menelusuri harga karbon yang efektif untuk pembangkit listrik. Indikator ini meliputi bagian besar dari emisi gas rumah kaca dan secara metodologi lebih mudah untuk ditelusuri karena teknologi yang relevan bersifat global, emisi dan kebijakan terkonsentrasi, serta beberapa informasi yang tersedia dapat dibandingkan antarnegara, internasional, dan organisasi lainnya.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua

a. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita (PPP, *current US\$ Atlas method*)

Pendapatan nasional bruto mengukur total pendapatan penduduk berdasarkan biaya hidup di masing-masing negara (paritas daya beli, PPP). Pendapatan ini didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah oleh semua produsen yang ada di negara tersebut, ditambah dengan pajak netto (dikurangi subsidi) tidak termasuk nilai output, ditambah penerimaan bersih dari penghasilan utama (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri.

International Comparison Program (ICP) dapat digunakan untuk menghitung paritas daya beli (PPP). Metode Atlas adalah metode Bank Dunia untuk menghitung nilai tukar untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar lintas negara dibandingkan dengan pendapatan nasional.

b. Laporan dan implementasi sistem neraca ekonomi dan lingkungan (*system of environmental-economic accounting*)

Komisi statistik PBB mengadopsi Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (SEEA) pada tahun 2012 sebagai standar internasional pertama untuk neraca ekonomi lingkungan. SEEA membawa statistik lingkungan dan hubungannya dengan ekonomi ke dalam inti statistik resmi dan dengan demikian memperluas Sistem Neraca Nasional (SNN), yang berfokus pada pengukuran kinerja ekonomi. Contoh informasi yang diberikan oleh SEEA termasuk penilaian tren dalam penggunaan dan ketersediaan sumber daya alam, tingkat emisi dan pembuangan ke lingkungan dari kegiatan ekonomi, dan jumlah aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk tujuan lingkungan. Komisi statistik PBB akan mengembangkan templat pelaporan untuk kerangka kerja sentral SEEA. Indikator ini mengukur apakah suatu negara memberlakukan dan melaporkan SEEA nasional. Indikator ini mempertimbangkan fakta bahwa beberapa elemen dari SEEA mungkin tidak berlaku untuk negara tertentu dan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai dari neraca yang dipilih tergantung pada prioritas kebijakan.

c. Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktik

Konvensi ILO menjelaskan standar perburuhan utama yang bertujuan untuk mendorong peluang pekerjaan yang layak dan produktif, di mana pria dan wanita bisa bekerja dalam kondisi yang sama, nondiskriminasi, aman, bebas dan bermartabat. Indikator yang diusulkan menelusuri ratifikasi negara dan kepatuhan dengan 8 konvensi fundamental ILO, yang mencakup hal-hal berikut, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib, usia minimum untuk tenaga kerja dan penghapusan langsung dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk upah yang setara.

Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan konvensi yang telah diratifikasi setiap dua tahun. Sistem pelaporan didukung oleh sistem pengawasan yang membantu untuk memastikan implementasi. ILO secara teratur mengkaji penerapan standar di negara-negara anggota dan membuat rekomendasi.

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi

a. Akses terhadap jalan untuk segala cuaca/*all weather road* (persentase akses pada [X] km jarak ke jalan)

Akses jalan yang bisa dilewati dan handal sepanjang tahun sangat penting untuk banyak proses pembangunan pedesaan, termasuk akses ke masukan, pasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki jarak [x km] dari tempat tinggal ke jalan yang andal dan bisa dilewati sepanjang tahun. Sebaiknya jalan tersebut harus diaspal untuk memastikan akses untuk kendaraan berat.

Saat ini belum tersedia data penduduk dengan akses terhadap jalan *all weather road* dengan jarak x km. Pendekatan yang pernah digunakan untuk mengetahui penduduk yang memiliki akses terhadap jalan menggunakan data hasil pendataan PODES. Jenis jalan yang diasumsikan dari hasil PODES adalah jalan untuk segala musim/*all season road* karena keterangan jenis jalan tidak dirinci pada pendataan. Keterbatasan data ini menjadi tantangan untuk menambahkan keterangan yang lebih rinci pada PODES mengenai akses penduduk desa terhadap infrastruktur jalan, terutama jalan untuk segala cuaca

(*all weather road*-seperti jalan aspal kondisi baik dan sedang) karena akses ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan pembangunan di perdesaan.

b. Mempercepat adopsi teknologi baru untuk tujuan pembangunan berkelanjutan

Teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi canggih lainnya sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Indeks yang akan dikembangkan ini dapat menelusuri kualitas dan kinerja infrastruktur TIK di setiap negara.

Indeks yang diusulkan akan mengukur tiga dimensi tertimbang kinerja infrastruktur TIK antara lain:

- a) Kualitas *broadband* tetap: diukur sebagai kecepatan download rata-rata (dalam kilobit per detik), sebagaimana ditetapkan melalui tes kecepatan pengguna;
- b) Kualitas *broadband* HP: diukur sebagai proporsi pengukuran uji kecepatan download dengan download throughput dari [1 megabit per detik] atau lebih; dan
- c) Kapasitas *bandwidth* internasional: diukur sebagai *bandwidth* terhubung melintasi perbatasan internasional ke daerah-daerah metropolitan pada pertengahan tahun (disajikan dalam megabit per detik (mbps)).

Setiap komponen dari indeks dan indeks secara keseluruhan dapat dinormalisasi dengan nilainya antara 1 dan 100

c. Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan

Indikator ini adalah ukuran kontribusi output industri terhadap perekonomian suatu negara. Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah adalah output bersih dari sektor manufaktur, dihitung setelah menambahkan semua output dan mengurangi input antara, ditentukan oleh *International Standard Industrial Classification* (ISIC) revisi 3, dan dihitung tanpa dikurangi depresiasi aset fabrikasi, atau

deplesi dan degradasi sumber daya alam. Indikatornya diukur sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB).

10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antarnegara

a. Indikator ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya atau rasio Palma

Kekhawatiran tentang ketimpangan berfokus pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan. Indikator 70, tentang “kemiskinan relatif”, menelusuri distribusi pendapatan bagian bawah, sementara indikator ini memantau perubahan di distribusi pendapatan bagian atas. SDSN melihat dua pilihan untuk indikator tersebut yaitu negara-negara dapat menelusuri kontribusi pendapatan oleh 10 persen penduduk terkaya dari populasi dan rasio Palma. Indikator alternatif yang semakin populer adalah rasio Palma yang didefinisikan sebagai rasio kontribusi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya terhadap 40 persen penduduk termiskin dari populasi. Rasio Palma berusaha untuk mengatasi beberapa keterbatasan koefisien Gini, yang gagal memperhitungkan perubahan struktur demografi (misalnya efek dari ledakan pertumbuhan penduduk atau populasi yang menua) dan tidak sensitif terhadap perubahan ekor (atas dan bawah) dari distribusi pendapatan, di mana pada bagian tersebut banyak terjadi perubahan.

Dengan menggunakan rasio sederhana yang bertentangan dengan pengukuran koefisien Gini yang lebih kompleks ini dapat lebih intuitif bagi para pembuat kebijakan dan warga negara. Sebagai contoh, tingginya nilai Palma jelas menggambarkan apa yang perlu diubah yaitu untuk mempersempit kesenjangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan 40 persen penduduk termiskin dan/atau dengan mengurangi kontribusi 10 persen penduduk terkaya.

Untuk menghitung ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran rumah tangga berdasarkan hasil Susenas. Penghitungan ketimpangan dengan menggunakan rasio Palma belum dilakukan sehingga nantinya dapat dihitung dengan menggunakan data pengeluaran tersebut. Namun, sebaiknya ada peningkatan kualitas pengumpulan data sehingga indikator dapat dihitung dengan menggunakan data pendapatan bukan dengan pendekatan pengeluaran. Data dapat dirinci berdasarkan desil maupun persentil, dan berdasarkan wilayah.

11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

a. Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal

Indikator ini dihitung dengan mengambil jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh kota dibagi dengan jumlah penduduk kota tersebut dan dinyatakan sebagai persentase. Di tingkat nasional, persentase ini dapat dihitung dengan mengambil jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh semua kota dibagi dengan total penduduk yang tinggal di semua kota di negara tersebut UN-Habitat telah mengembangkan definisi dari rumah tangga kumuh agar dapat dilakukan survei atau sensus di tingkat rumah tangga untuk mengidentifikasi penghuni kawasan kumuh di kalangan penduduk perkotaan. Rumah tangga dalam permukiman kumuh (*slum household*) adalah kelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari indikator berikut:

- a) Rumah yang kokoh, yang dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca yang ekstrem,
- b) Ruang huni yang cukup, yang berarti tidak lebih dari 3 orang menghuni 1 ruang bersama,
- c) Akses yang mudah ke air bersih (aman) dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,
- d) Akses ke sanitasi yang memadai, dalam bentuk toilet pribadi atau toilet bersama,
- e) Kepastian atau rasa aman bermukim (*secure tenure*), yang dapat melindungi penghuninya dari penggusuran paksa.

b. Memastikan akses universal yang aman dan layak ke lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon

Tidak adanya jaminan kepemilikan atas perumahan penduduk kota dapat memiliki implikasi penting bagi pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan inklusi sosial. Indikator yang diusulkan ini terdiri dari dua komponen yaitu persentase yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan persentase yang tidak takut penggusuran sewenang-wenang. Bukti kepemilikan dan persepsi memberikan informasi penting dan saling melengkapi tentang jaminan kepemilikan tanah. Walaupun bukti kepemilikan dianggap penting, tetapi tidak cukup untuk mengukur jaminan kepemilikan, karena persepsi juga

memberikan informasi tambahan yang sangat berharga. Selain itu, ukuran persepsi dapat memfasilitasi perbandingan lebih berguna di negara-negara.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

a. Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer

Kerugian makanan karena ketidakefisienan dalam rantai dan sisa produksi pangan tersebar luas hampir di semua negara. Saat ini, data mengenai kerugian dan sisa makanan sangat jarang dan sulit untuk dibandingkan secara internasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk mengukur kerugian dan sisa dari berbagai kategori produk makanan dan seluruh tahapan dari panen hingga konsumsi akhir. Dilihat dari pentingnya kerugian dan sisa makanan, diperlukan indikator dasar untuk mengetahui perkembangan kerugian dan sisa makanan dari waktu ke waktu. FAO saat ini sedang mengembangkan indikator kerugian pangan global, yang diharapkan sudah jadi pada akhir 2015 walaupun masih perlu divalidasi. Indeks ini didasarkan pada model yang menggunakan variabel-variabel yang memengaruhi kerugian pangan (misalnya kepadatan jalan, cuaca dan hama) untuk memperkirakan kerugian kuantitatif. Data variabel ini tersedia dari beberapa sumber, termasuk statistik di tiap-tiap negara, FAOSTAT, indeks kapasitas logistik WFP, World Road Statistics, dan lain-lain. Selain itu, tergantung juga pada prioritas dan sistem pemantauan, tiap-tiap negara dapat mengadopsi indikator lain untuk mengetahui kerugian pangan dan/atau sisa makanan.

b. Menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

Saat ini, sebagian besar perusahaan hanya melaporkan hasil keuangan mereka tanpa memerhatikan dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya investor mungkin tidak menyadari risiko yang timbul dari proses produksi perusahaan, serta masyarakat juga tidak mengetahui kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Beberapa standar pelaporan terpadu sudah dikembangkan untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Salah satu contoh yang menonjol adalah *International Integrated Reporting Council* (IIRC). SDSN mengusulkan indikator yang dapat digunakan

untuk mengetahui persentase perusahaan besar (yaitu lebih besar dari US \$ 1 miliar (diukur dalam PPP)) yang menyiapkan laporan terpadu yang konsisten terhadap SDGs dan sesuai dengan standar yang perlu didefinisikan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

a. Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2oC atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050

Mempertahankan pemanasan global dalam 2°C atau lebih rendah, mensyaratkan negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi tahun 2050, yang meliputi semua sumber emisi GRK termasuk dari energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Strategi ini harus transparan dan rinci tentang bagaimana negara-negara ingin mencapai pengurangan emisi (termasuk emisi yang terkait dengan energi), bagaimana mengurangi konsumsi energi, zat arang sektor listrik, dan menyediakan listrik penggunaan energi (khususnya di sektor transportasi dan bangunan). Mencakup target untuk mengurangi emisi GRK pada tahun 2020, 2030 dan 2050. Indikator ini juga mengusulkan untuk mengukur pelaksanaan strategi tersebut.

b. Mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah GRK netto (ton CO2 ekuivalen) di sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, dipilah menurut gas bumi (CO₂, N₂O, dan CH₄) dan menurut kategori lahan yang digunakan (lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lainnya), berdasarkan *panduan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006* untuk inventarisasi GRK nasional, dan *Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry (GPG-LULUCF)*. Metode inventarisasi harus praktis dan operasional. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, GRK antropogenik dan pembuangan melalui wastafel didefinisikan sebagai semua yang ada pada lahan terkelola. Lahan terkelola merupakan lahan yang sudah terdapat intervensi kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi, fungsi ekologi dan

sosialnya. Untuk lahan tak terkelola emisi GRK tidak perlu dilaporkan. Namun, menjadi sebuah tindakan yang baik apabila negara mengukur dan melacak luas lahan tak terkelola dari waktu ke waktu sehingga konsistensi pelaporannya tercatat sebagai perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

c. Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

Negara-negara maju telah menjanjikan pada Konferensi UNFCCC untuk memberikan sekitar \$100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim pada tahun 2020. Dengan indikator ini akan diketahui pendanaan iklim resmi yang disediakan oleh masing-masing negara maju sebagai perbandingan terhadap target keseluruhan pendanaan yang setidaknya sebesar \$ 100 miliar per tahun.

14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan

a. Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut

Dua pertiga permukaan bumi terdiri dari lautan, dan setengah dari permukaannya terdiri dari laut lepas. Kesehatan lautan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Belum ada satu variabel pun yang dapat menggambarkan kesehatan laut dan sistem pesisirnya, oleh karena itu SDSN mengusulkan untuk menggunakan indeks komposit kesehatan laut yang menilai kesehatan laut secara keseluruhan. Indeks kesehatan laut ini diukur melalui 10 aspek ekosistem maritim dan penggunaannya oleh manusia yaitu penyediaan makanan, kesempatan memancing bagi nelayan, produk alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi, mata pencaharian dan ekonomi daerah pesisir, sense of place, air bersih, dan keanekaragaman hayati. Setiap aspek dievaluasi dengan empat dimensi yaitu status saat ini, tren saat ini, tekanan yang ada dan ketangguhan. Empat dimensi ini digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengemasan laut dan polusi nutrisi (seperti tekanan) dan faktor institusional seperti daerah perlindungan laut (sebagai kontribusi terhadap ketahanan). Dengan demikian indeks kesehatan laut menyediakan shorthand indeks untuk status laut dunia dan area pesisir.

15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati

a. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian

Indikator ini berguna untuk mengetahui perubahan neto dari kawasan hutan dan perluasan pertanian ke ekosistem alam, serta hilangnya lahan pertanian produktif untuk pertumbuhan daerah perkotaan, industri, jalan, dan penggunaan lainnya, yang dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara. Hal ini diukur sebagai persentase perubahan per tahun. Intensifikasi agroekologi yang berkelanjutan juga akan memungkinkan peningkatan produksi pangan tanpa mengubah ekosistem alami menjadi lahan pertanian. Lahan budidaya didefinisikan oleh FAO sebagai lahan yang ditanami oleh tanaman sementara, padang rumput sementara untuk menyabit atau padang rumput, lahan yang ditanami untuk kebutuhan pasar atau dapur, dan lahan sementara yang ditanami. Kawasan hutan adalah tanah yang ditanam pohon, tidak termasuk pohon dalam sistem produksi pertanian (misalnya perkebunan atau sistem *agroforestry*) dan pohon di taman kota dan kebun.

b. Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

Indikator perubahan tahunan di kawasan hutan dan kawasan lindung dengan keanekaragaman hayati memberikan informasi penting tentang perubahan kawasan hutan dan perlindungan kawasan hutan. Indikator yang berkaitan dengan hutan diperlukan untuk mengetahui penggunaan hutan untuk kegiatan ekonomi dan lainnya yang berkelanjutan. *Global Forest Resources Assessment 2010* telah mengusulkan indikator tersebut untuk mengukur persentase hutan dengan pengelolaan yang berkelanjutan.

c. Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat paling lambat pada 2020

Red List Index (RLI) merupakan indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui Tingkat kepunahan kelompok laut dan spesies darat dalam waktu dekat (yaitu 10-50 tahun) dengan tidak adanya tindakan

konservasi. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa risiko kepunahan suatu spesies meningkat. RLI juga digunakan untuk mengukur kemajuan menuju target Aichi 12 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati dan MDGs. IUCN *red list* adalah sistem yang paling memiliki reputasi untuk mengetahui status spesies yang terancam menurut tujuh kategori risiko yang berkisar dari “punah” sampai “kurang perhatian”. Kriteria untuk menentukan status risiko masing-masing spesies mudah dipahami bagi masyarakat umum. *Red list index* ini telah dikembangkan untuk berbagai kelompok spesies utama, seperti amfibi dan burung, namun tetap terdapat kesenjangan, khususnya untuk kelompok spesies utama, seperti jamur.

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

a. Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik

Statistik ini mengukur cedera dan kematian akibat kekerasan, termasuk serangan (pemukulan, pelecehan, pembakaran) dan kekerasan bersenjata tetapi bukan kecelakaan atau cedera yang diakibatkan diri sendiri, dinyatakan dalam unit per 100.000 penduduk. SDSN mengusulkan adanya cedera, karena ada banyak bentuk kekerasan yang tidak mengakibatkan kematian.

b. Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu pada tahun 2020, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan

Korupsi di sektor publik merupakan hambatan bagi pembangunan, upaya pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi sulit diukur karena data obyektif cenderung sangat lengkap dan sulit untuk dibandingkan. *Transparency International* (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global yang bekerja untuk memerangi korupsi dan telah mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Peringkat indeks persepsi korupsi negara-negara didasarkan atas seberapa korup sektor publik mereka

(administrasi dan politik). Indeks ini merupakan indeks komposit berbasis data persepsi terkait korupsi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka. Indeks ini mencerminkan pandangan pengamat dari seluruh dunia, termasuk para ahli yang tinggal dan bekerja di negara dan wilayah yang dievaluasi.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

a. Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

Indikator MDG ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengurangi atau menghilangkan tarif (bea masuk yang menjadi hambatan keuangan untuk impor) dalam tiga sektor (pertanian, tekstil dan pakaian) yang sangat penting bagi negara berkembang dan negara miskin. Menghapus tarif negara maju, khususnya di sektor ini yang mencakup sebagian besar ekspor negara berkembang, bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

b. Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap pendapatan nasional sebanyak 0,7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi

Indikator ini mengukur bantuan resmi pembangunan (ODA) ditambah hibah swasta bersih sebagai bagian dari PNB negara-negara berpendapatan tinggi. Target nilai ODA adalah sebesar 0,7% dari PNB.

c. Memperkuat sarana dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan

Untuk menjadi alat manajemen dan rapor yang efektif, SDGs perlu didukung oleh kualitas data yang dilaporkan setiap tahun. Hal ini akan membutuhkan investasi yang signifikan untuk meningkatkan instrumen pengukuran yang ada (misalnya untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan disagregasi), membuat instrumen baru, dan membangun kapasitas kantor statistik negara, terutama di negara miskin, dan lembaga statistik internasional. Indikator investasi di data dan monitoring bisa menelusuri investasi langsung dalam program tersebut, atau mengukur investasi sebagai bagian dari ODA atau GNI.

Mengenal Wilayah Teluk Tomini Bolaang Mongondow Timur

A. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak pada 1050 sampai 1060 bujur timur dan 10 sampai 20 lintang selatan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di Kecamatan Tutuyan. Luas daerah keseluruhan adalah 866,54 Km² atau kira-kira 6,55 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Terdapat 7 kecamatan yaitu Nuangan, Tutuyan, Kotabunan, Modayag, Modayag Barat, Motongkad dan Mooat. Jumlah desa yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertambah menjadi 80 desa (sampai tahun 2019) dari 51 desa tahun 2012. Pada tahun 2020, terjadi pemekaran wilayah pada tingkat desa/kelurahan yaitu pada kecamatan Motongkad, desa Molobog Timur mekar dari desa awal yaitu Molobog Induk. Sehingga mulai tahun 2020, jumlah desa sebanyak 81 (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Sebagian besar wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0–8 %) dengan luas 12.745,06 hektar atau 14 %, landai (kelerengan 8–15 %) dengan luas 4.496,08 atau 4,94 %, agak curam (kelerengan 15–25 %) dengan luas 14.011,65 Hektar atau 15,39 %. dan wilayah curam dengan kelerengan 25 % – 40 % adalah 37.021,03 hektar atau 40,67 %, sedangkan sangat curam dengan kelas lereng > 40 % seluas 22.743,77 hektar atau 24,99 %. Untuk ketinggian wilayah bervariasi di tiap kecamatan, ketinggian 0–175 m dpl terdapat: Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, dan Nuangan. Sedangkan ketinggian 175–1.750 m dpl terdapat di kecamatan Kotabunan, Tutuyan, dan Nuangan, Modayag dan Modayag Barat (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Pertumbuhan penduduk merujuk pada peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini diukur sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor utama: laju kelahiran (fertilitas) dan laju kematian (mortalitas), ditambah dengan migrasi.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur tahun 2023, jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur tercatat sejumlah 89.731 jiwa, yang terdiri dari 46.862 jiwa penduduk laki-laki dan 42.869 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

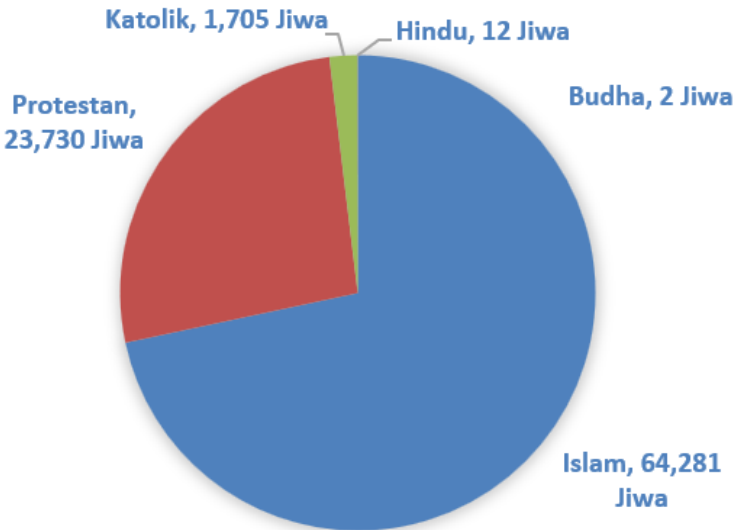
Tabel 3.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, 2023

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
Nuangan	10.771	2.72	108.82
Motongkad	8.323	2.72	108.7
Tutuyan	16.179	2.52	109.76
Kotabunan	16.895	3.04	109.98
Modayag	19.711	2.57	106.74
Mooat	7.275	2.57	106.32
Modayag Barat	13.145	1.86	111.78

BPS Kabupaten Bolaang Mangondow Timur mencatat bahwa jumlah populasi terbesar terdapat di Kecamatan Modayag yakni 19.711 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mooat tercatat sebagai wilayah yang paling sedikit penduduknya sebanyak 7.275 jiwa. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterpencilan geografis, keterbatasan infrastruktur, atau kurangnya lapangan kerja yang menyebabkan rendahnya minat orang untuk bermukim di wilayah tersebut. Untuk laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Kotabunan tercatat memiliki laju tertinggi yaitu 3.04%, sementara yang terendah adalah Kecamatan Modayag Barat dengan laju sebesar 1.86% (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Mayoritas penduduk di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur menganut agama Islam sebagai kepercayaan, dengan jumlah penganut mencapai 64.281 jiwa. Sebanyak 23.730 jiwa penduduk Kabupaten

Bolaang Mangondow Timur menganut agama Protestan, 1.705 jiwa penduduk menganut agama Katolik, 12 jiwa penduduk memeluk agama Hindu. Sedangkan, agama yang paling sedikit dianut di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur adalah agama Budha dengan jumlah penganut hanya 2 jiwa (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023). Meskipun didominasi oleh Agama Islam, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur menjunjung tinggi keberagaman beragama yang mencerminkan toleransi dan pluralitas masyarakatnya serta memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama.



Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, 2023

Piramida penduduk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur berbentuk ekspansif. Fungsi dari piramida ekspansif adalah untuk menunjukkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Piramida penduduk ekspansif juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia muda lebih tinggi atau besar dibandingkan dengan penduduk berusia tua. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur membuat pemerintah masih berfokus pada pengendalian penduduk dan memberikan pembinaan kepada penduduk berusia produktif. Disamping itu, pemerintah perlu menerapkan strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah harus mem-prioritaskan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan

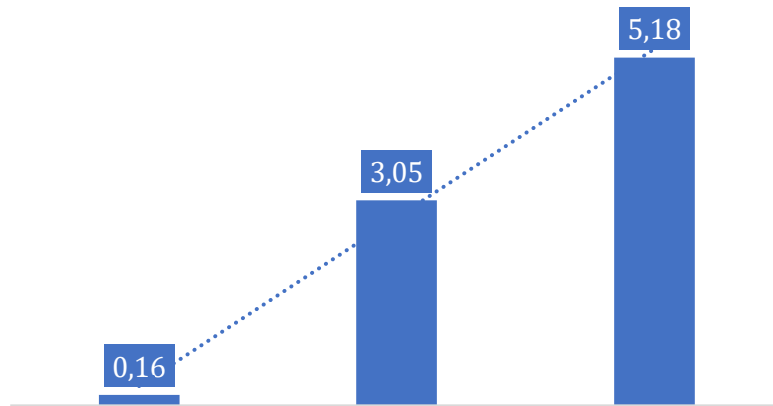
memastikan akses yang lebih luas untuk pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan remaja. Program beasiswa dan bantuan pendidikan harus ditingkatkan untuk membantu keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana penduduk suatu wilayah atau negara merasa puas dengan kehidupan mereka dan memiliki akses yang memadai terhadap berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, makanan, air bersih, perumahan, dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan atau kemakmuran ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, kesehatan, lingkungan, dan psikologis. Beberapa elemen kesejahteraan masyarakat meliputi kesehatan fisik dan mental penduduk. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, kebiasaan hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Kesejahteraan masyarakat melibatkan akses yang merata terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan yang baik membuka pintu kesempatan, meningkatkan kemampuan individu, dan mempromosikan mobilitas sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat.

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah konsep yang mengukur kesejahteraan ekonomi dalam produksi ekonomi suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dalam hal PDB (Produk Domestik Bruto), yang merupakan nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu periode waktu, seperti satu tahun. Berikut adalah sajian data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mangondow Timur dalam lima tahun terakhir:



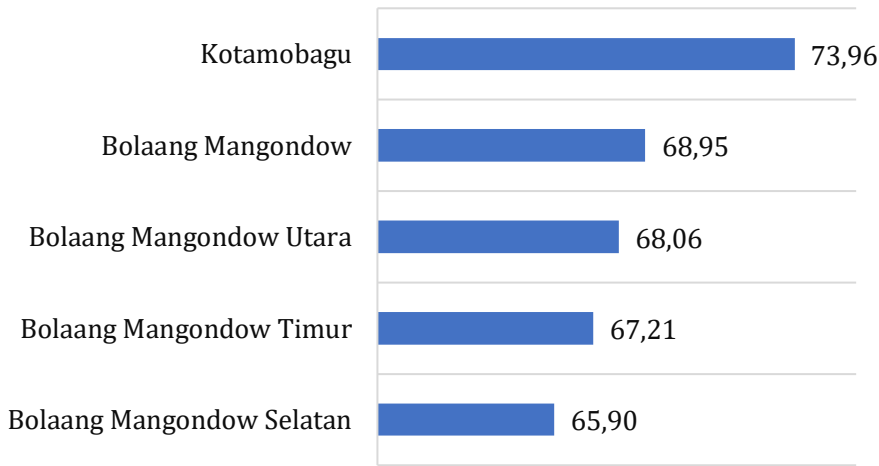
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2020 - 2022

Perekonomian Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang terjadi tahun 2020 sebesar 0,16 persen, kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022 tumbuh masing-masing sebesar 3,05 dan 5,18 persen. PDRB (ADHB) Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 sebesar 3.532,94 miliar Rupiah. Dan PDRB atas harga konstannya sebesar 2.039,19 miliar rupiah. PDRB perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2022 PDRB per Kapita ADHB sebesar 38,28 juta rupiah, naik dibanding tahun sebelumnya yakni 36,08 juta rupiah. Jika dilihat secara ADHK, PDRB per Kapita pada tahun 2020 sampai 2022 juga mengalami kenaikan dari 21,46 pada tahun 2020 menjadi 22,09 juta rupiah pada tahun 2022. Struktur perekonomian masih bersifat agraris. Kontribusi terbesar di tahun 2022 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 39,19 persen disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 29,22 persen (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

2. Indeks pembangunan manusia

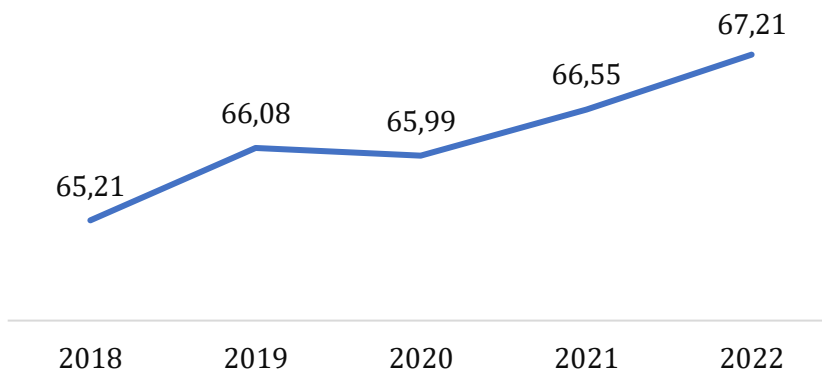
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Setiap indikator komponen perhitungan IPM dapat menjadi tolok ukur kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara

keseluruhan. Dalam pengukurannya, IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Dengan adanya fokus pada aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat tercapai kesetaraan dan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. IPM Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 berada pada posisi ke-14 dari 15 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Bolaang Mongondow “Raya”, IPM Bolaang Mongondow Timur berada pada posisi ke-4.



Gambar 3.3 Perbandingan IPM se-Bolmong Raya, 2022

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Bolaang Mongondow Timur

Pada tahun 2020, Angka IPM Bolaang Mongondow Timur mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2020 angka IPM Bolaang Mongondow Timur adalah 65,99 menurun dari 66,08 pada tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan penurunan angka IPM di Provinsi Sulawesi Utara yakni 72,93 pada tahun 2020 menurun dari 72,99 pada tahun 2019. Sedangkan semenjak terjadi penurunan pada tahun 2020, angka IPM Bolaang Mongondow Timur meningkat di tiap tahunnya yakni 66,55 pada tahun 2021 dan 67,21 pada tahun 2022 (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).

Tabel 3.2 Komponen Penyusun IPM Bolaang Mongondow Timur

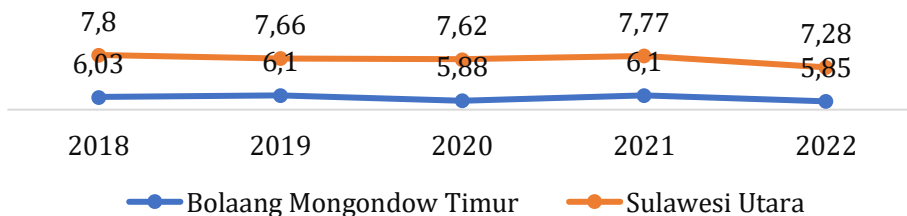
Uraian	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	67,89	67,94	68,24
Harapan Lama Sekolah	11,59	11,86	11,88
Rata-rata Lama Sekolah	7,83	7,93	8,09
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	8.998	9.116	9.39

Pada tahun 2022 IPM Bolaang Mongondow Timur berada pada peringkat ke-14 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terlihat bahwa komponen IPM Angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Bolaang Mongondow Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa sumber penurunan angka IPM di tahun 2020 ini dikarenakan komponen IPM pengeluaran per kapita menurun. Untuk meningkatkan angka IPM di tahun selanjutnya, pembangunan di setiap komponen harus diperhatikan.

3. Kemiskinan

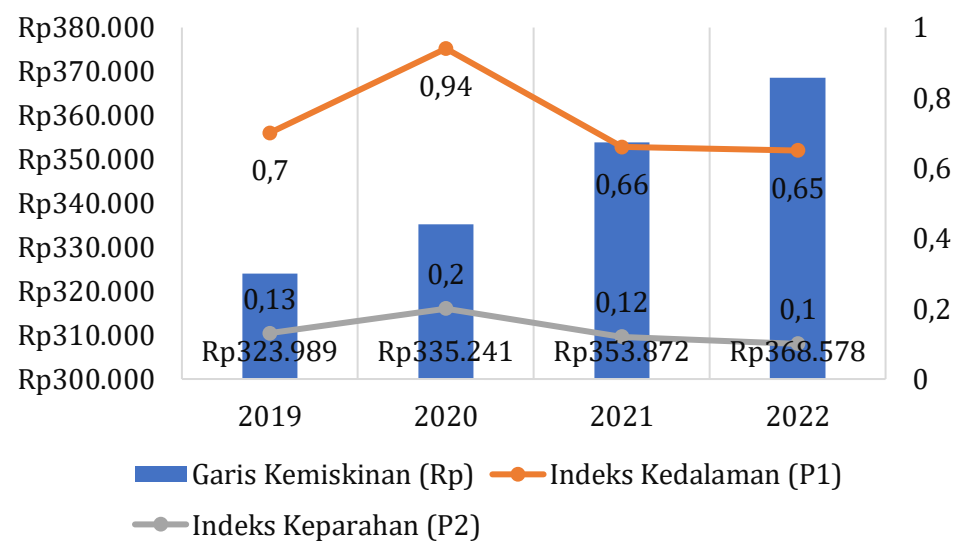
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di berbagai negara. Kemiskinan memiliki dampak yang sangat serius dan luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak kemiskinan sering kali terkait dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang cukup, dan sanitasi yang layak. Akibatnya, individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai penyakit infeksi, malnutrisi, dan penyakit kronis, serta memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Selain itu, kemiskinan juga dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Banyak keluarga miskin tidak mampu membiayai biaya sekolah, membeli buku dan perlengkapan sekolah, atau bahkan harus menarik anak-anak mereka dari sekolah untuk membantu mencari nafkah. Akibatnya, kemiskinan dapat mempersempit peluang pendidikan dan mobilitas sosial.

Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Dalam skala nasional, pengentasan kemiskinan juga masih menjadi tema pembangunan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu terkait strategi pengurangan tingkat kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.



Gambar 3.5 Tren Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2018-2023

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 sebesar 5,85% di mana angka ini relatif menurun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 saat terjadi Covid-19 angka kemiskinan justru mengalami penurunan dari 6.1% menjadi 5.88%. Ini menandakan bahwa pandemi tidak terlalu berdampak pada kemiskinan. Hal tersebut karena efek pandemi hanya menggerogoti kalangan menengah ke atas. Meski begitu, melihat tren 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur cenderung datar, itu berarti dibutuhkan effort yang besar dalam menekan angka kemiskinan hingga mencapai kurang dari 5% (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023).



Gambar 3.6 Tren Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pada pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai batas/besaran untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah (atau lebih rendah) dari garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur mengalami peningkatan setiap tahun selama beberapa periode terakhir. Pada tahun 2020, garis kemiskinan mencapai 335.241 rupiah per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi 353.872 rupiah pada 2021 dan kembali naik menjadi 368.578 rupiah pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebab naiknya garis kemiskinan adalah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari atau akibat dari inflasi.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata perbedaan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar jarak antara pengeluaran penduduk dan garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur tercatat mengalami penurunan selang tahun 2019 – 2022 dari 0.7 menjadi 0.65. Capaian Ini memiliki arti bahwa rata-rata pengeluaran mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

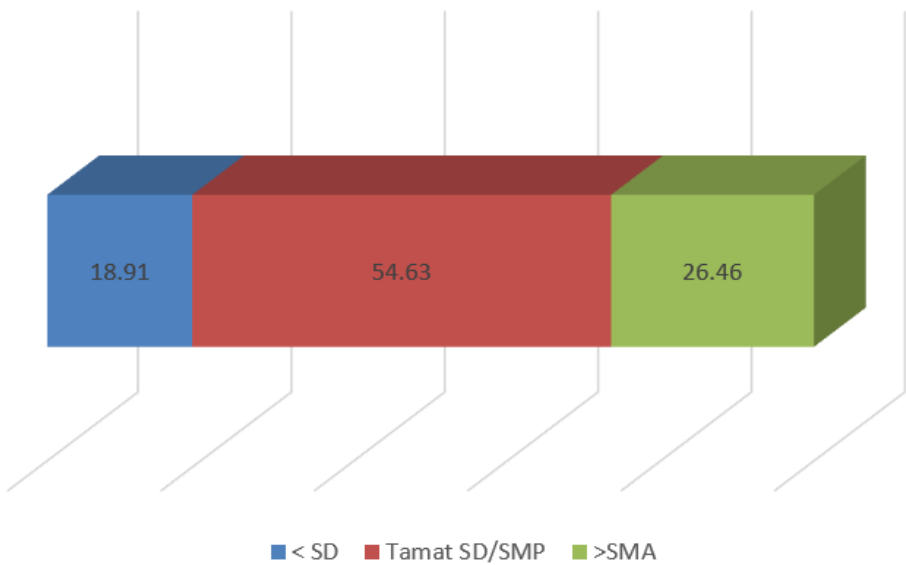
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana ketimpangan pengeluaran terjadi di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran di antara mereka. Di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan tren yang relatif menurun sejak periode 2019 sebesar 0.13 menjadi 0.1 di tahun 2022. Kondisi ini menandakan munculnya situasi yang kompleks dalam mengukur kemiskinan. Perubahan semacam ini dapat terjadi jika ada pergeseran distribusi pendapatan di antara populasi yang berada di bawah garis kemiskinan.

Ketika indeks kedalaman kemiskinan meningkat, itu berarti rata-rata pendapatan individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan semakin jauh di bawah ambang batas. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri. Artinya, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan mungkin menghadapi kondisi yang semakin buruk dan memerlukan lebih banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan.

Di sisi lain, jika indeks keparahan kemiskinan menurun, itu menunjukkan bahwa perbedaan dalam tingkat kemiskinan di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi lebih kecil. Hal ini berarti mungkin ada kelompok penduduk yang sebelumnya berada di dalam kondisi kemiskinan yang parah, tetapi kemudian berhasil naik ke tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Meskipun masih berada di bawah garis kemiskinan, mereka mungkin telah mengalami

peningkatan dalam hal pendapatan, akses ke layanan dasar, atau peluang kerja yang lebih baik.

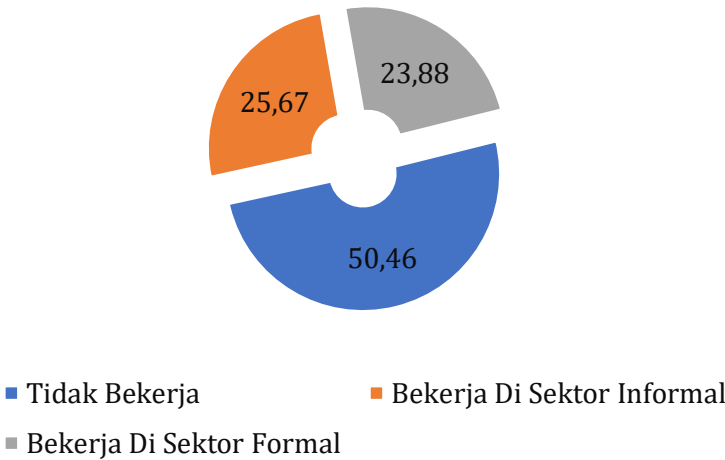
Dengan berbagai intervensi kebijakan, termasuk program bantuan pendidikan, beasiswa, dan fasilitas pendidikan yang memadai, upaya dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memecah siklus kemiskinan. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara kemiskinan dan pendidikan, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mencapai potensi mereka penuh dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka pintu kesempatan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan mobilitas sosial. Dengan memperoleh pendidikan yang memadai, individu memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan mereka. Berikut adalah data persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.



Gambar 3.7 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, Tahun 2023

Salah satu dampak utama dari kemiskinan adalah pendapatan rendah. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki pekerjaan dengan upah rendah atau bahkan menganggur, yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Melalui berbagai intervensi kebijakan, seperti program pelatihan keterampilan, pemberian tunjangan pengangguran, dan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, upaya dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki status kerja masyarakat. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara kemiskinan dan status kerja, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah data persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan status bekerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.



Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Bekerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2023

Melihat data penduduk miskin berdasarkan status bekerja, diketahui bahwa mayoritas penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah tidak bekerja yakni 50.46% dan yang bekerja tetapi di sektor informal sebesar 25.67% (BPS Bolaang Mongondow Timur, 2023). Tingginya persentase penduduk miskin yang tidak bekerja menunjukkan adanya masalah serius dalam hal pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ini dapat menjadi indikasi bahwa terdapat keterbatasan dalam lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ada, atau hambatan lain yang menghambat partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Sementara persentase yang signifikan dari penduduk miskin yang bekerja di sektor

informal menunjukkan bahwa sektor informal mungkin menjadi sumber penghidupan yang penting bagi sebagian besar penduduk miskin. Ini dapat menunjukkan bahwa penduduk miskin cenderung mengandalkan pekerjaan yang tidak terstruktur, tanpa jaminan keamanan kerja, upah yang rendah, dan akses terbatas terhadap manfaat sosial. Perlu ada dorongan pertumbuhan sektor formal agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkualitas, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap manfaat sosial dan perlindungan pekerja.

C. Aspek Pelayanan Umum

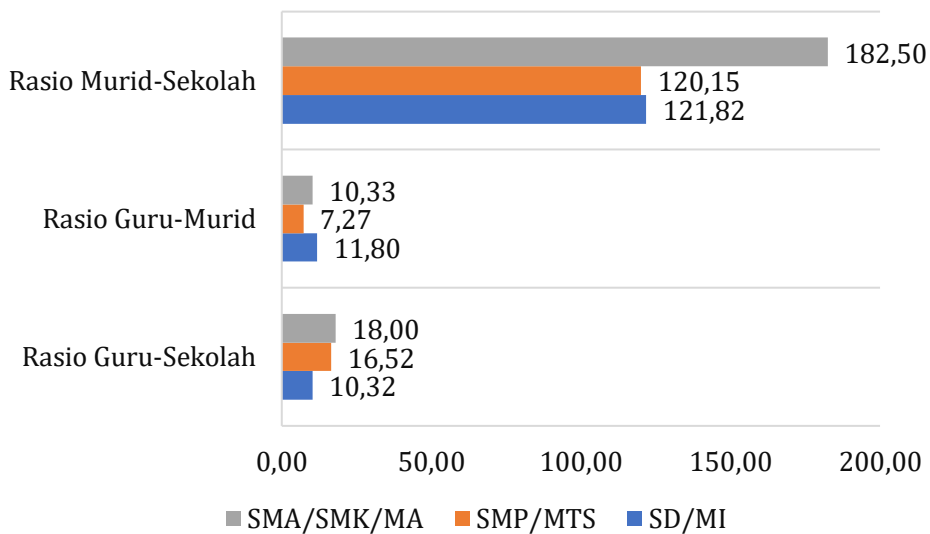
1. Pendidikan

Data mencatat, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur adalah 108 sekolah yang terdiri dari tiga jenjang pendidikan, sementara SD/MI merupakan jenjang pendidikan yang memiliki jumlah sekolah dan Guru terbanyak di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur tahun 2023.

Tabel 3.3 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
SD/MI	62	7.561	697
SMP/MTS	30	506	506
SMA/SMK/MA	16	288	288

Efektifitas proses belajar mengajar di kelas berhubungan dengan besar kecilnya beban tanggung jawab seorang guru membimbing murid atau rasio guru terhadap murid. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat rata-rata seorang guru bertanggung jawab membimbing sebanyak sekitar 12 murid pada SD/MI. Untuk jenjang pendidikan SMP sederajat rata-rata seorang guru mengajar sekitar 8 murid dan di jenjang SMA sederajat beban seorang guru hanya mengajar sekitar 10 murid. Rasio ideal yang dikeluarkan diknas adalah 22 orang murid per guru, artinya yang secara rata-rata guru di Boltim sudah mencukupi. Namun yang harus dilihat lagi adalah persebaran guru di masing-masing sekolah.



Gambar 3.9 Rasio Guru-Murid dan Guru-Sekolah Bolaang Mongondow Timur

Angka Melek Huruf di Bolaang Mongondow Timur sudah baik (99,96 persen pada tahun 2021). Ini artinya sebagian besar atau 99,96 persen penduduk di atas 15 tahun sudah mampu baca-tulis. Di tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas semakin lama semakin panjang menjadi 7,93 tahun.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Alasan mengapa kesehatan sangat penting karena kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, merasa energik, dan merasa bahagia. Kesehatan yang baik juga memengaruhi produktivitas individu. Orang yang sehat cenderung lebih produktif dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka memiliki energi yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien dan efektif.

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan utama sangat diharapkan ada minimal di setiap ibukota kabupaten/kota. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mulai tahun 2022 sudah resmi beroperasi Rumah Sakit Pratama Ambang, rumah sakit pertama yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Rumah sakit ini merupakan

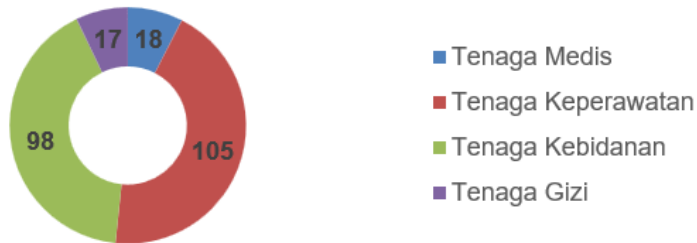
rumah sakit umum daerah yang lebih tepatnya didirikan di Kecamatan Modayag.

Tabel 3.4 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022
Rumah Sakit	0	0	1
Puskesmas	8	8	8
Puskesmas Pembantu	13	16	16
Puskesmas Keliling Darat	0	0	0
Puskesmas Rawat Inap	0	3	3
Posyandu	0	81	81

Fasilitas kesehatan memiliki berbagai manfaat penting bagi Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk setempat. Ini membantu dalam penanganan penyakit, pencegahan penyakit, serta memberikan perawatan yang diperlukan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan medis dan informasi kesehatan. Ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, memperbaiki perilaku kesehatan, dan mencegah penyakit menular dan tidak menular. Fasilitas kesehatan yang mudah diakses, penanganan penyakit yang mematikan seperti malaria, tuberculosis, dan penyakit menular lainnya dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal ini berpotensi untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup penduduk. Pentingnya fasilitas kesehatan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipandang remeh, dan merupakan salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator untuk melihat pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan. Penanganan persalinan secara tepat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan. Berdasarkan gambar 3.8, ditunjukkan bahwa tenaga keperawatan merupakan tenaga medis paling banyak yang ada di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur dengan jumlah 108, disusul oleh tenaga kebidanan yang juga menunjukkan angka yang cukup signifikan dengan jumlah 98.



Gambar 3.10 Jumlah Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

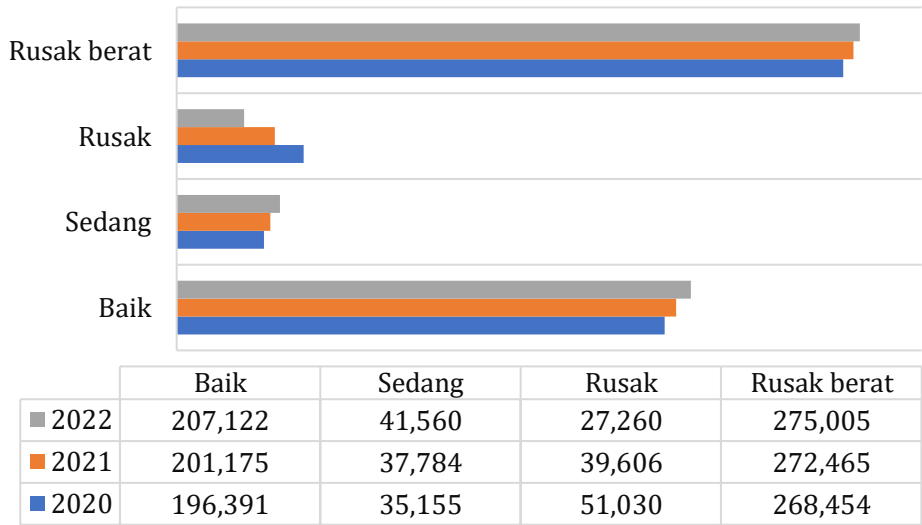
Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti halnya di seluruh wilayah lainnya. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya menyediakan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat setempat. Mereka membantu dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Tenaga kesehatan juga membantu dalam upaya pencegahan penyakit dengan memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan program-program promosi kesehatan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Selain itu, tenaga kesehatan memberikan perawatan medis kepada individu yang sakit atau mengalami cedera. Mereka merawat pasien di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya, serta memberikan obat-obatan dan tindakan medis yang diperlukan. Tenaga kesehatan juga terlibat dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, baik secara individu maupun melalui program-program komunitas. Mereka memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, pola makan yang baik, kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta tindakan pencegahan penyakit tertentu. Dengan adanya tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkomitmen di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Infrastruktur jalan

Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan jalan yang lancar, transportasi publik yang efisien, dan akses yang memadai ke air bersih dan listrik, dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, daerah ini dapat menarik investasi, memfasilitasi perdagangan, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.

Selain itu, Infrastruktur yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan adanya sekolah-sekolah, pusat kesehatan, dan fasilitas keamanan yang mudah dijangkau, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimilikinya. Infrastruktur pariwisata yang baik, seperti akses jalan yang baik, akomodasi yang memadai, dan fasilitas wisata yang berkualitas, dapat membantu mengembangkan industri pariwisata daerah ini, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat setempat.



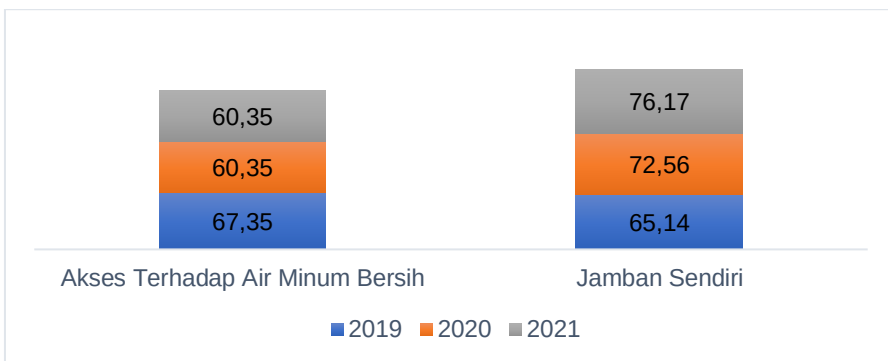
Gambar Tabel 3.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (km), 2020–2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jalan rusak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selalu mengalami peningkatan volume dari tahun 2020-2023, terhitung sejak tahun 2020 ke 2023 mengalami kenaikan dari 268,454 KM menjadi 275,005 KM. Sementara, kondisi jalan baik juga setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan setiap tahun terus dilakukan perbaikan.

4. Sumber daya air

Persediaan air yang cukup dan berkualitas sangat penting bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap air bersih harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Air bersih adalah kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, masyarakat dapat menghindari penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Ini akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), untuk penggunaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, PDAM cabang Nuangan memproduksi air minum beragam setiap bulannya. Jika dijumlahkan, PDAM cabang Nuangan telah memproduksi sebanyak 40.387,31 liter air minum. Adapun jika melihat dari segi pelanggan yang berlangganan air kepada PDAM cabang Nuangan terdapat 181 pelanggan, dan 159 pelanggan dari total pelanggan adalah pelanggan yang aktif. Selanjutnya, pada tahun 2021, air yang disalurkan PDAM cabang Nuangan adalah sebanyak 3.324.120 liter air. Berikut adalah data akses terhadap air minum dan ketersediaan jamban di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama tiga tahun terakhir.

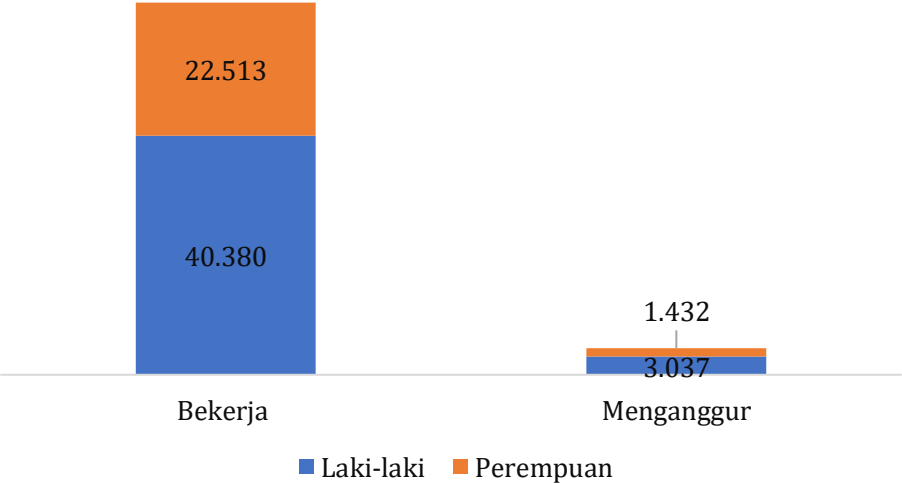


Gambar 3.12. Akses Terhadap Air Minum Dan Ketersediaan Jamban di Kabupaten Bolaang Mongondow, 2019-2021

D. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya saing sumber daya manusia

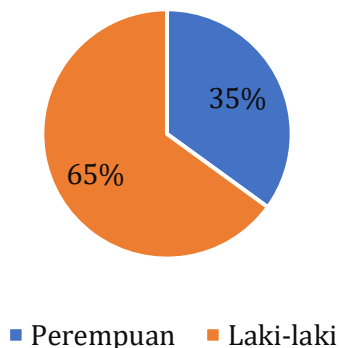
Angkatan kerja mencakup semua individu yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu negara atau wilayah, termasuk mereka yang bekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang menganggur tetapi masih mencari pekerjaan. Angkatan kerja biasanya terdiri dari orang-orang yang berusia antara 15 dan 64 tahun. Namun, definisi ini dapat bervariasi berdasarkan kebijakan dan kondisi ekonomi negara tertentu. Angkatan kerja juga mencakup individu yang menganggur, yaitu mereka yang ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi mencari pekerjaan.



Gambar 3.13 Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2023

Berdasarkan gambar 3.13, komposisi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebanyak 40.380 jiwa bekerja di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur berjenis kelamin laki-laki, sementara yang bekerja dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 22.513 jiwa. Sementara untuk angka pengangguran, didominasi oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 3.037 jiwa, sedangkan perempuan 1.432 jiwa.

Partisipasi angkatan kerja mengacu pada persentase individu yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam suatu populasi usia kerja. Partisipasi angkatan kerja mencakup baik pekerja yang bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu maupun mereka yang aktif mencari pekerjaan. Ini juga dapat mencakup mereka yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan struktur keluarga. Misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung lebih tinggi di antara kelompok usia yang lebih muda dan lebih rendah di antara kelompok usia yang lebih tua.

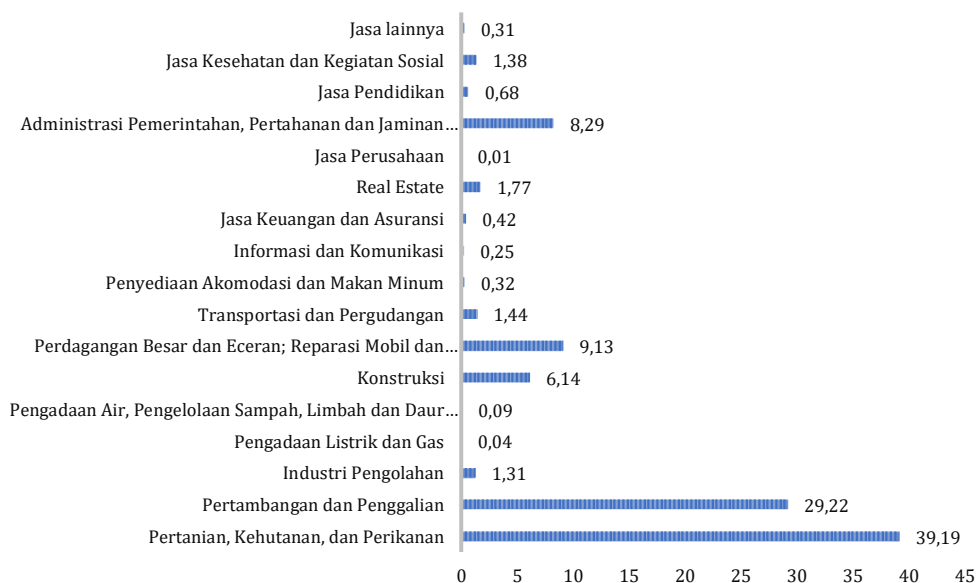


Gambar 3.14 Persentase Angkatan Kerja Bolaang Mongondow Timur Menurut Jenis Kelamin, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 65,07 persen di tahun 2021 menjadi 68,63 persen di tahun 2022 dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan tingkat pengangguran juga meningkat dari 5,99 persen di tahun 2021 menjadi 6,59 persen di tahun 2022. Pengangguran ini bisa ditindaklanjuti dengan penyediaan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga penduduk yang masuk angkatan kerja bisa berubah status dari tidak bekerja menjadi bekerja. Bisa juga dengan menambah beasiswa sehingga siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa terus sekolah dan tidak menambah jumlah angkatan kerja sekaligus menambah jumlah pengangguran. Banyaknya angkatan kerja yang ada di Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 sebagian besar adalah laki-laki. Dengan persentase 65 persen laki-laki dan 35 persen perempuan.

2. Produk domestik regional bruto

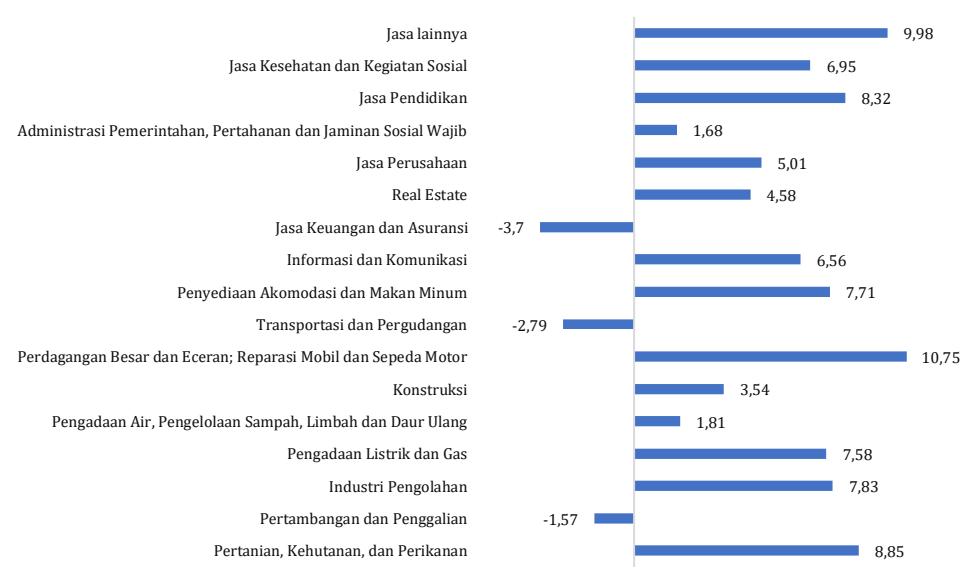
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tujuan yang dikejar oleh banyak negara karena memiliki dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mangondow Timur periode 2023 tercatat sebesar 5,15%. Capaian ini menguat jika dibandingkan dengan periode 2022 yang hanya mampu mencapai 3,05%. Hal ini menandakan terjadi perbaikan struktur ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pasca dihantam Covid-19 di tahun 2020. Diketahui, kondisi ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada masa Covid-19 mengalami kontraksi hingga terjun sampai 0,16%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mangondow Timur didorong oleh peningkatan PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur secara berturut-turut dari 1.938,80 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 2.039,19 miliar rupiah tahun 2022



Gambar 3.15 Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2023

PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur periode 2022 disumbang oleh jasa perdagangan pertanian, kelautan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 39,9%, jasa pertambangan dan penggalian sebesar 29,22%, jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor 9,13%, jasa administrasi pemerintahan 8,29%, dan jasa konstruksi 6,14%. Kelima sektor ini menjadi lapangan usaha terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur. Sedangkan sektor yang paling sedikit menyumbang untuk PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur adalah jasa perusahaan yang pada periode terakhir hanya sebesar 0,01%, meskipun demikian, sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yakni sebesar 5,01% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 1,43%. Di sisi lain, jasa pertanian kehutanan dan perikanan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini mencerminkan terjadinya transformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada jasa, perdagangan, dan sektor layanan lainnya di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.



Gambar 3.16 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menurut Lapangan Usaha, 2022

Sering kali sektor tersier memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsumsi rumah tangga. Jika sektor ini menjadi penyumbang utama PDRB, maka kegiatan konsumsi masyarakat akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat berarti bahwa permintaan domestik dan daya beli masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun di sisi lain, transformasi ekonomi yang didorong oleh sektor tersier dapat

menciptakan ketimpangan ekonomi jika sektor primer dan sekunder terpinggirkan. Kesenjangan pendapatan antara pekerja di sektor tersier dengan pekerja di sektor primer dan sekunder dapat memperbesar divisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor tersier juga dapat memberikan risiko jika sektor ini mengalami tekanan atau gangguan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor primer dan sekunder secara berkelanjutan.

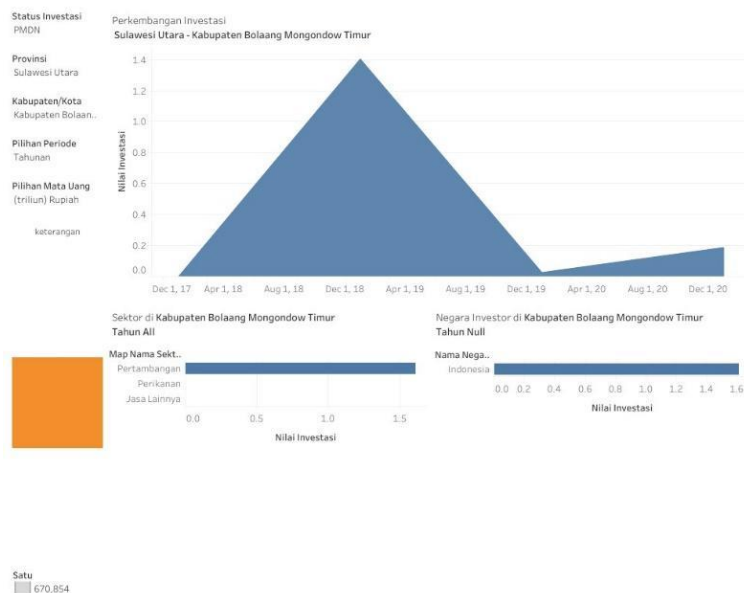
Tabel 3.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran, 2022

Komponen Pengeluaran	Distribusi (%)
Konsumsi Rumah Tangga	48,69
Konsumsi LNPR	0,97
Konsumsi Pemerintah	17,46
PMTB	19,14
Perubahan Inventori	0,01
Net Ekspor	61,66
Net Impor	47,92
Total PDRB	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di periode 2022 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga sebesar 48,69%. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai porsi yang relatif besar dengan kontribusi sekitar 19,14%, diikuti dengan proporsi Konsumsi Akhir Pemerintah dengan kontribusi sebesar 17,46%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, perdagangan antarwilayah Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, baik perdagangan internasional maupun perdagangan antar Kabupaten, yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor (ekspor – impor). Hal ini menandakan bahwa adanya kecenderungan posisi “surplus” pada perdagangan di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur pada tahun 2022.

3. Iklim investasi

Penanaman modal dalam negeri (*domestic investment*) merujuk pada investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis yang berada di dalam suatu negara ke sektor-sektor ekonomi di dalam negara tersebut. Penanaman modal dalam negeri menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri sendiri, baik itu dari investor individu, perusahaan, lembaga keuangan domestik, atau pemerintah. Dana ini dapat berasal dari tabungan domestik, laba reinvestasi, atau pinjaman dari bank dan lembaga keuangan domestik. Tujuan dari penanaman modal dalam negeri bisa bermacam-macam, termasuk untuk memperluas operasi bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, atau mendiversifikasi portofolio investasi. Berikut penanaman modal dalam negeri yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

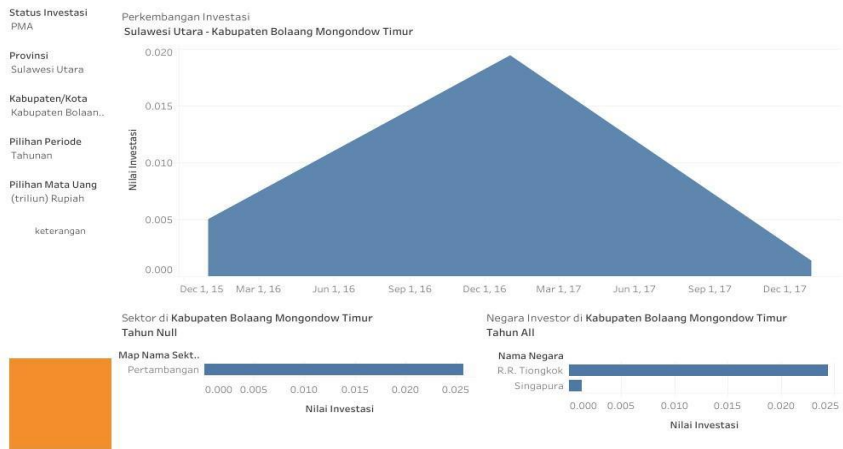


Gambar 3.17 Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penanaman modal dalam negeri memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memfasilitasi investasi dalam negeri, dan memastikan bahwa

manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat dan ekonomi lokal. Data menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow di dominasi oleh sektor pertambangan.

Penanaman modal asing (PMA) merujuk pada investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di suatu negara. Manfaat penanaman modal asing di antaranya dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. FDI membawa modal baru, teknologi, manajemen, dan keahlian yang dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi tertentu, mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing. Investasi asing biasanya melibatkan pembangunan atau ekspansi fasilitas produksi, yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Investasi asing juga dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk lokal, meningkatkan ekspor dan memperluas perdagangan internasional. Dengan mengintegrasikan ekonomi domestik ke dalam rantai nilai global, FDI dapat membantu memperkuat posisi ekonomi suatu negara di pasar internasional. Berikut penanaman modal asing yang ada di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.



Gambar 3.18 Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Meskipun penanaman modal asing membawa banyak manfaat, juga penting untuk memerhatikan risiko yang terkait, seperti ketergantungan ekonomi pada investor asing, potensi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta tantangan lingkungan dan sosial yang dapat

timbul dari aktivitas industri. Oleh karena itu, pemerintah harus memerhatikan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk mengelola investasi asing dengan bijaksana demi mendapatkan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sama halnya dengan investasi dalam negeri, data menunjukkan bahwa investasi asing di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di dominasi oleh sektor pertambangan dengan sumber investasi yang berasal dari Tiongkok dan Singapura.

Data tersebut sejalan dengan kondisi PDRB yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan cenderung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Investasi yang besar dalam sektor ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan signifikan dalam jangka pendek. Hal ini terutama terlihat dalam penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta meningkatkan pendapatan per kapita. Namun yang perlu diwaspadai adalah dominasi sektor pertambangan dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada sektor tersebut. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor berisiko menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global atau perubahan regulasi yang memengaruhi sektor tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan kesulitan dalam mencapai diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi yang terkonsentrasi dalam sektor pertambangan seringkali tidak merata dalam mendistribusikan manfaat ekonomi. Ada risiko bahwa manfaat ekonomi dari investasi ini tidak akan dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal, dan bahkan bisa memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah-wilayah yang terlibat langsung dalam sektor pertambangan dan wilayah lainnya. Sektor pertambangan juga sering dikaitkan dengan dampak lingkungan yang serius, termasuk degradasi tanah, pencemaran air, dan deforestasi. Jika tidak dikelola dengan baik, investasi dalam sektor ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat lokal, serta menimbulkan biaya lingkungan yang tinggi di masa depan. Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari investasi dalam sektor pertambangan dan mengurangi dampak negatifnya, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Ini termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses pertambangan.

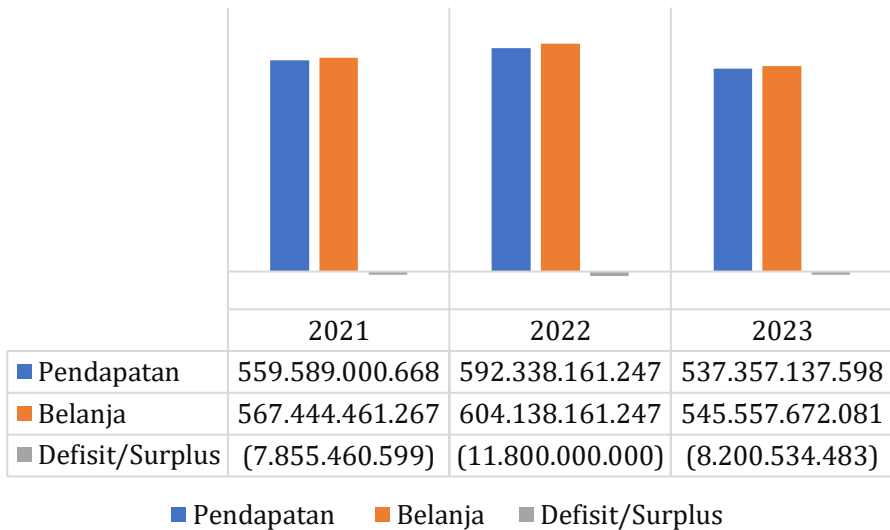
E. Gambaran kondisi keuangan daerah

1. Evaluasi APBD

APBD merupakan alat pengendalian keuangan yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. APBD memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Melalui alokasi anggaran yang tepat dan efektif, serta program-program penanggulangan kemiskinan yang baik, APBD dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program dan proyek-proyek yang telah direncanakan dalam APBD, alasan mengapa evaluasi APBD penting karena evaluasi APBD membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan dana publik. Dengan mengevaluasi bagaimana dana telah digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, masyarakat dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Serta membantu mengendalikan pengeluaran pemerintah daerah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemborosan dana publik. Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi pengeluaran, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area di mana terdapat deviasi atau kelebihan pengeluaran yang perlu di atasi. Dengan evaluasi APBD, pemerintah daerah juga dapat mengevaluasi kinerja program-program dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini membantu menilai apakah program dan proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sejauh mana pencapaian hasil, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Adapun APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dievaluasi dengan cara membandingkan pendapatan (*revenue*) dan belanja (*expenditure*).



Gambar 3.19 Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami kenaikan dari Rp. 559.589.000.668 miliar di tahun 2021 menjadi Rp. 592.338.161.247 miliar di tahun 2022. Di satu sisi, belanja daerah membengkak dari Rp. 567.444.267 miliar di tahun 2021 menjadi Rp. 604.138.161.247 miliar di tahun 2022. Selama tiga tahun terakhir struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami defisit hingga mencapai Rp. 27.855.995.082 miliar.

Fenomena ini menggambarkan situasi yang serius dan patut diperhatikan dalam kaitannya dengan struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penurunan pendapatan mencerminkan adanya masalah dalam penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik dari sektor pajak, retribusi, atau sumber-sumber pendapatan lainnya. Penurunan pendapatan ini dapat berdampak pada kemampuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menyediakan layanan dan infrastruktur yang memadai. Sedangkan peningkatan belanja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan biaya operasional pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kebutuhan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur baru, dan meningkatnya program-program pemerintah yang berbiaya tinggi. Selanjutnya pada bagian analisis belanja akan dikaji lebih dalam apakah belanja tersebut telah diarahkan secara

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Analisis anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana atau perkiraan mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima oleh suatu entitas, seperti pemerintah, perusahaan, atau individu, dalam suatu periode waktu tertentu. Anggaran pendapatan biasanya disusun sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan untuk mengatur pengeluaran dan investasi yang sesuai dengan pendapatan yang diharapkan. Anggaran pendapatan pemerintah adalah perencanaan mengenai sumber-sumber pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun fiskal. Sumber pendapatan pemerintah bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak properti, royalti sumber daya alam, penerimaan dari perusahaan milik negara, dan dana-dana lainnya seperti hibah dan pinjaman. Anggaran pendapatan sangat penting karena menjadi dasar untuk merencanakan dan mengalokasikan dana bagi berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dengan menetapkan target pendapatan yang realistis, pemerintah dapat mengatur pengeluaran mereka dengan lebih efektif, memprioritaskan program-program yang penting, serta mengelola defisit anggaran jika diperlukan.

Melihat fenomena yang ditunjukkan pada gambar 3.9, maka evaluasi atas pendapatan anggaran dilaksanakan untuk menilai apakah upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat miskin. Diasumsikan bahwa upaya peningkatan pendapatan sering kali melibatkan dua strategi umum, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak dan retribusi. Namun, dampak dari strategi ini dapat berpengaruh negatif pada akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perumahan, yang merupakan sektor-sektor krusial dalam mencegah tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang hati-hati dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Detail struktur

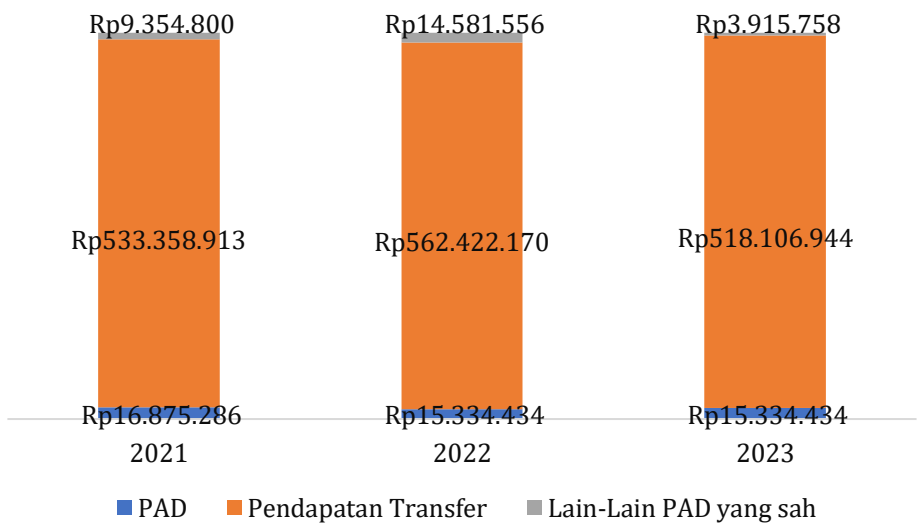
Anggaran Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2021 hingga 203 dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Struktur Anggaran Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Total Pendapatan	559.589.000.668,00	592.338.161.247	537.357.137.598
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.875.286.912,00	15.334.434.747	15.334.434.747
Pajak Daerah	7.178.717.958,00	9.358.185.906	9.358.185.906
Retribusi Daerah	1.984.765.650,00	2.034.384.791	2.034.384.791
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	950.000.000,00	973.750.000	973.750.000
Lain-lain PAD yang Sah	6.761.803.304,00	2.968.114.050	2.968.114.050
Pendapatan Transfer	533.358.913.756,00	562.422.170.305	518.106.944.051
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	522.916.945.000,00	550.152.878.000	499.822.422.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.441.968.756,00	12.269.292.305	18.284.522.051
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.354.800.000,00	14.581.556.195	3.915.758.800,00
Pendapatan Hibah			
Dana Darurat			
Lainnya	9.354.800.000,00	14.581.556.195	3.915.758.800

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama periode 2021-2023 perlahan mengalami pertumbuhan. Capaian ini mengindikasikan bahwa potensi-potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Meskipun demikian, pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih sangat bergantung pada pendapatan transfer terutama

transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2021, pendapatan transfer Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat sebesar Rp. 533.358.913.756. Tahun 2022, pendapatan transfer meningkat menjadi Rp. 562.422.170.305 miliar. Tahun 2023, pendapatan transfer menurun Rp. 662,290 miliar dengan DAU Rp. 481,750 miliar. Dana perimbangan kembali menurun menjadi Rp. 518.106.944.051 miliar. Penyebab total pendapatan mengalami defisit juga dikarenakan komponen lain-lain pendapatan yang sah terjun drastis dari Rp. 9.354.800.000 miliar di tahun 2021, menjadi Rp. 3.915.758.800,00 miliar di tahun 2023.



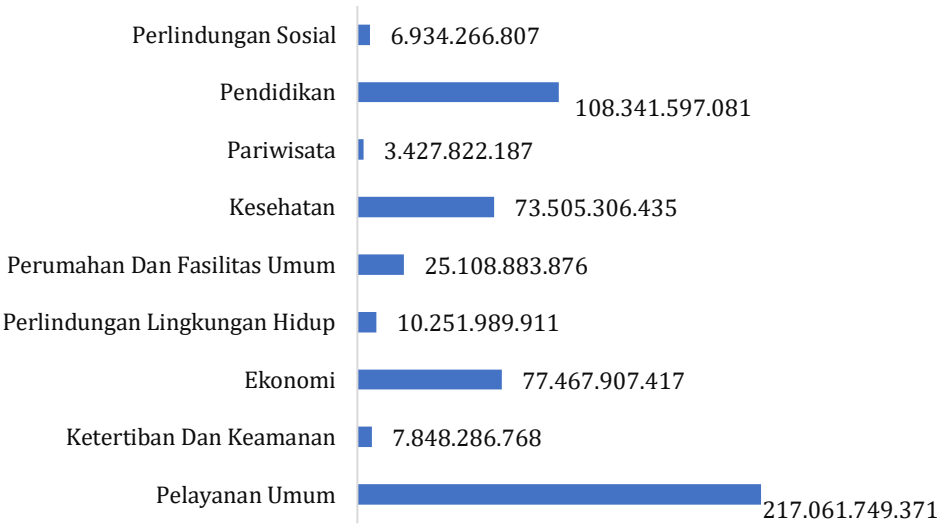
Gambar 3.20 Perbandingan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2023

Sementara itu, pendapatan asli daerah dibentuk oleh empat komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil PKD, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen dengan kontribusi pembentuk PAD paling besar disumbang oleh pajak daerah. Tahun 2021, komponen pajak daerah sebesar Rp. 7.178.717.958 miliar meningkat menjadi Rp. 9.358.185.906 miliar di tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah menjadi komponen terbesar kedua dalam PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp. 6.761.803.304 miliar pada tahun 2021, namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing Rp. 2.968.114.050. Retribusi daerah menjadi komponen yang konsisten naik selama 2021-2023. Pada tahun 2021, Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur memperoleh retribusi daerah sebesar Rp. 1.984.765.650 miliar. Tahun 2022 dan 2023, retribusi daerah sebesar Rp. 2.034.384.791 miliar. Sedangkan hasil PKD tumbuh dari Rp. 950.000.000 miliar pada tahun 2021, menjadi Rp. 973.750.000 miliar pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga tahun 2023.

3. Analisis anggaran belanja

Realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran yang melibatkan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut. Proses ini mencakup pencairan dana, pengeluaran, dan pelaporan penggunaan dana yang telah dilakukan. Dalam konteks pemerintah, realisasi anggaran mengacu pada penggunaan dana publik untuk berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran belanja pemerintah. Ini mencakup pengeluaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Berikut adalah uraian realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 dari berbagai sektor.



Gambar 3.21 Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa bidang mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar adalah bidang pelayanan umum dengan nominal Rp. 217.061.749.371, disusul dengan bidang pendidikan yang memperoleh anggaran sebesar Rp. 108.341.597.081,

sedangkan yang mendapatkan porsi anggaran paling sedikit adalah bidang pariwisata dengan nominal Rp. 3.427.822.187.

4. Ruang Fiskal

Ruang fiskal daerah adalah kemampuan atau kewenangan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Konsep ruang fiskal daerah melibatkan penilaian terhadap fleksibilitas dan keberlanjutan keuangan daerah dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa faktor yang memengaruhi ruang fiskal daerah meliputi tingkat pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti pajak, royalti, transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain. Pendapatan yang tinggi memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan. Selanjutnya pengeluaran yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pengeluaran yang efisien dan efektif dapat meningkatkan ruang fiskal daerah. Beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran mereka. Ketergantungan ini dapat membatasi ruang fiskal daerah dalam mengambil keputusan keuangan secara mandiri. Faktor-faktor ekonomi lokal seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan juga memengaruhi ruang fiskal daerah.

APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian. Melalui alokasi belanja yang mencerminkan kebijakan-kebijakan tertentu, APBD bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan ekspansi ini, baik APBD maupun APBN harus memerhatikan fleksibilitas fiskal yang dimiliki, yang disebut sebagai ruang fiskal. Konsep ruang fiskal digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung prioritas pembangunan. Tingkat fleksibilitas ini juga berdampak pada keberlanjutan fiskal di masa depan karena tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, mengatur defisit, serta mengoptimalkan pengeluaran. Semakin besar ruang fiskal

yang tersedia, maka semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program dan kegiatan, termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Tabel 3.5 berikut ini memuat informasi lebih lanjut tentang perkembangan ruang fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 3.7 Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Pajak Daerah	7.178.717.958	9.358.185.906	9.358.185.906
Retribusi Daerah	1.984.765.650,00	2.034.384.791	2.034.384.791
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	950.000.000,00	973.750.000	973.750.000
Lain-lain PAD yang Sah	6.761.803.304,00	2.968.114.050	2.968.114.050
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	522.916.945.000,00	550.152.878.000	499.822.422.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.441.968.756,00	12.269.292.305	18.284.522.051
Lainnya	9.354.800.000,00	14.581.556.195	3.915.758.800
Total Pendapatan	559.589.000.668,00	592.338.161.247	537.357.137.598
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Pegawai	217.202.717.889,00	215.504.037.416	212.929.708.725
Total Belanja	567.444.461.267,00	604.138.161.247	545.557.672.081
Ruang Fiskal (Rp)	342.386.282.779	376.834.123.831	324.427.428.873
Ruang Fiskal (%)	61,19	63,62	60,37

Analisis ruang fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 – 2023 menunjukkan persentase ruang fiskal relatif naik menurun. Tahun 2021 ruang fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 61.19%. Kemudian naik hingga 63.62% di tahun 2022, Pada tahun 2023, ruang fiskal kembali turun menjadi 60,37% namun

lebih rendah daripada tahun 2021. Ini menjadi sinyal peringatan karena ruang fiskal yang semakin sempit dapat menghambat kemampuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk membiayai program dan proyek yang penting bagi masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa perubahan dalam ruang fiskal bukan hanya masalah satu tahun, tetapi telah berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan dan manajemen keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.

Penurunan ruang fiskal terjadi karena penurunan kemampuan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, dapat memiliki dampak yang signifikan. Penurunan ruang fiskal mungkin mengharuskan pemerintah untuk mengurangi belanja publik pada program-program kesejahteraan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Penurunan ruang fiskal juga dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang kurang berkembang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mobilitas tenaga kerja, dan akses pasar. terjadinya ketidakstabilan ekonomi juga merupakan dampak dari penurunan ruang fiskal, karena pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti pembayaran utang dan gaji pegawai. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pasar keuangan, serta menyebabkan fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Penurunan ruang fiskal dapat memiliki dampak serius terhadap layanan publik dan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kemampuan untuk membiayai proyek-proyek penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat terganggu. Ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 4

Keberhasilan Capaian Indikator SDGs

A. Kategori Capaian Indikator SDGs

Pemetaan indikator SDGs mengacu pada kriteria capaian indikator TPB/SDGs yang terdiri dari 5 kelompok yaitu:

1. Kelompok A adalah indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian 100% pada tahun 2030.
2. Kelompok B adalah indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 90% dari target pada tahun 2030.
3. Kelompok C adalah indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 75% dari target pada tahun 2030.
4. Kelompok D adalah indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 50% dari target pada tahun 2030.
5. Kelompok E adalah indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian di bawah 50% dari target pada tahun 2030.

Di Indonesia, terdapat 169 Target/Sasaran Global dan 319 Indikator Sasaran Nasional TPB/SDGs. Dari 319 indikator nasional tersebut, diketahui sebanyak 308 indikator merupakan kewenangan pusat, 235 indikator merupakan kewenangan Provinsi, 220 indikator merupakan kewenangan Kabupaten, dan 222 indikator merupakan kewenangan Kota (Bappenas RI, 2020). Dalam konteks ini, setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya masing-masing. Dari total 17 goals dan 169 indikator yang terbagi pada empat pilar, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ada 8 goals dan 21 indikator yang dapat diidentifikasi ketersediaan data sehingga dapat diproyeksi capaiannya.

Tabel 4.1 Pemetaan Indikator

Pilar	Goal	Indikator
Sosial	1	1.1.1 Kemiskinan ekstrem
		1.2.1* Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
		1.2.2* Imunisasi dasar
		1.2.2* Harapan lama sekolah
		1.2.2* Rata-rata lama sekolah
Lingkungan	6	6.1.1* Persentase rumah tangga menggunakan layanan air minum dikelola secara aman
		6.2.1c Persentase rumah tangga mempraktikkan BAB sembarangan di tempat terbuka
		6.2.1d Persentase rumah tangga memiliki akses SPALD-T
		6.4.2a Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan
	11	11.1.1(a) Persentase rumah tangga memiliki akses hunian layak dan terjangkau
Ekonomi	8	8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita
		8.1.1(a) PDB per kapita (USD)
		8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
	9	9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur
	10	10.1.1* Rasio gini
		10.1.1(a) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menurut JK dan Usia
	17	17.1.1* Rasio total pendapatan terhadap PDB
		17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
		17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai pajak daerah
Hukum	16	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui

Sumber: Data diolah (2023)

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam perencanaan pembangunan mengharuskan adanya target yang spesifik, terikat waktu, dan dapat diukur, yang sejalan dengan rencana dan prioritas pembangunan. Proses ini membutuhkan kapasitas data dan statistik yang kuat, yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan data pendukung yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, data yang disediakan oleh BPS menjadi sumber utama dalam melakukan proyeksi atau peramalan capaian indikator TPB/SDGs karena dianggap lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah capaian indikator SDGs Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketersediaan data;

Tabel 4.2 Capaian Indikator

Indikator	Target	Capaian	Proyeksi	Kategori
1.1.1 Kemiskinan ekstrem	< 7%	4.30%	3.52%	A
1.2.1* Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	< 7%	5.88%	4.88%	C
1.2.2* Imunisasi dasar	> 90%	67.64%	75.16%	C
1.2.2* Harapan lama sekolah	> 99%	12.85	12.32	A
1.2.2* Rata-rata lama sekolah	> 98%	7.83	8.68	B
6.1.1* Persentase rumah tangga menggunakan layanan air minum dikelola secara aman	100%	100%	100%	A
6.2.1c Persentase rumah tangga mempraktikan BAB sembarangan di tempat terbuka	0%	8.94%	0%	A
6.2.1d Persentase rumah tangga memiliki akses SPALD-T	100%	76.68%	100%	A
6.4.2a Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan	131.36 m3/dtk	132	132	A

Indikator	Target	Capaian	Proyeksi	Kategori
11.1.1(a) Persentase rumah tangga memiliki akses hunian layak dan terjangkau	> 80%	86.35%	73.31%	B
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita	7%	4.84%	7.84%	A
8.1.1(a) PDB per kapita (USD)	> 6,000 USD	7,583 USD	8,591 USD	A
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	< 3.6%	5.99%	1.56%	B
9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	> 8.1%	7.91%	11.69%	A
10.1.1* Rasio gini	< 0.376	0.37	0.46	D
10.1.1(a) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menurut JK dan Usia	< 8.5%	6.10%	5.94%	A
17.1.1* Rasio total pendapatan terhadap PDB	> 12%	14.64%	4.51%	E
17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	> 8.87%	0.06%	0.09%	E
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai pajak daerah	Meningkat	1.14%	1.95%	Tidak ada target
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Tidak Ada	95.05%	98.89%	Tidak ada target

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel di atas mencatat bahwa terdapat sepuluh indikator yang proyeksi capaiannya berada pada kategori A, tiga indikator berada pada kategori B, dua indikator berada pada kategori C, satu indikator berada pada kategori D, dan dua indikator berkategori E. Dua indikator lainnya yakni 17.1.2* proporsi anggaran domestik yang didanai pajak daerah dan 16.6.1* proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap

anggaran yang disetujui memiliki capaian dan proyeksi yang positif, namun dikarenakan tidak adanya target secara kuantitatif, maka indikator ini tidak berada pada kategori manapun.

Sajian data tersebut juga mengindikasikan bahwa ada tiga indikator yang membutuhkan intervensi kebijakan secara mendalam dikarenakan capaiannya yang belum memenuhi target SDGs bahkan terproyeksikan menjauh dari apa yang telah ditargetkan. Tiga indikator tersebut membutuhkan perhatian khusus terutama karena berada pada pilar ekonomi. Adapun tiga indikator yang beroleh proyeksi dengan kategori D dan E adalah 10.1.1* rasio gini, 17.1.1* rasio total pendapatan terhadap PDB, dan 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

B. Sinkronisasi Indikator SDGs dengan RPJMD dan IKU

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 disusun pada saat terjadi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dampak dari pandemi ini berakibat pada terjadinya perlambatan ekonomi dan risiko ketidakpastian serta permasalahan yang tinggi terhadap sektor-sektor yang lain, di antaranya permasalahan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pariwisata, sosial, budaya, dan agama. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah kebijakan luar biasa dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk periode 5 (lima) tahun ke depan telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyesuaian penjabaran target dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh masing-masing perangkat daerah perlu juga disesuaikan dengan fokus pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Upaya untuk mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode Tahun 2021-2026 diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangun-

an, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor - faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta acuan bagi para stakeholder terkait dalam partisipasi aktif pembangunan.

Memastikan adanya sinkronisasi antara strategi dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tujuan pembangunan nasional (SDGs) perlu dilakukan penyelarasan antara indikator SDGs dengan target RPJMD. Penyelarasan indikator

Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan upaya untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB dalam SDGs dapat terintegrasi dan diimplementasikan secara efektif dalam skala regional atau daerah. Proses ini penting guna mencapai keselarasan antara prioritas nasional, regional, dan lokal dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dari total 20 (dua puluh) indikator yang dapat diidentifikasi ketersediaan data, terdapat 3 (tiga) indikator yang masuk pada kategori D dan E. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai faktor-faktor apa yang telah menyebabkan capaian yang jauh dari target. Ini melibatkan analisis terhadap hambatan, tantangan, dan kekurangan yang mungkin muncul selama implementasi program atau kebijakan terkait SDGs. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kesamaan antara prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan tujuan SDGs. Pada bagian ini, ditentukan tujuan SDGs yang paling relevan dan dapat diintegrasikan dengan visi, misi, dan program-program yang ada dalam RPJMD.

Tabel 4.3 Sinkronisasi Indikator SDGs Kategori D dan E Dengan RPJMD Dan IKU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Indikator SDGs	Target SDGs	Capaian	Proyeksi 2030	Target RPJMD		Keterangan
				2023	2024	
1.2.1* Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	7%	5.88%	4.88%	5.65	5.3	IKU – Persentase kemiskinan
10.1.1* Rasio Gini	0.376	0.37	0.46	0.4	0.4	IKU – Indeks Gini Ratio
17.1.1* Proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB	12%	14.64%	4.51%	595,046,326,717.00	602,194,959,534.32	Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026
17.1.1(a) Proporsi pajak daerah terhadap PDB	8.87%	0.06%	0.09%	9,592,140,554.62	10,071,747,582.35	Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

Sumber: RPMJD Kab. Bolaang Mongondow Timur, dilah (2023)

Sinkronisasi antara indikator SDGs dengan RPJMD dan IKU daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan terhadap kedua kerangka kerja (SDGs dan RPJMD). Indikator dari RPJMD dapat digunakan sebagai proxy atau mencerminkan kemajuan terhadap tujuan SDGs yang sesuai.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator SDGs yang membutuhkan intervensi kebijakan, indikator 1.2.1* persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan indikator 10.1.1* rasio gini selaras dengan indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sedangkan indikator 17.1.1* proporsi total pendapatan terhadap PDB dan indikator 17.1.1(a) proporsi pajak daerah terhadap PDB tidak secara eksplisit tercantum pada IKU/IKD, namun secara implisit target pendapatan dan pajak daerah dimuat pada RPJMD 2021-2026 tentang Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026, serta dapat terakomodir pada IKD – rasio PAD, dengan asumsi ketika pajak daerah atau PAD meningkat, maka akan diikuti oleh meningkatnya total pendapatan daerah. Sehingga analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman akan menguraikan apa saja aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam merumuskan strategi guna mendorong tercapainya ketiga indikator ini melampaui apa yang ditargetkan pada RPJMD maupun SDGs.

1. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin & umur

Indikator ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kemiskinan memengaruhi berbagai kelompok dalam populasi suatu negara, terutama dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan usia. Dengan demikian, indikator ini membantu dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok-kelompok yang rentan. Indikator ini penting karena kemiskinan tidak memengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Perbedaan jenis kelamin dan usia dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kemiskinan. Misalnya, anak-anak dan wanita sering kali lebih rentan terhadap kemiskinan daripada pria dewasa. Dengan memahami bagaimana jenis kelamin dan usia memengaruhi tingkat kemiskinan, pemerintah dan organisasi dapat mengarahkan sumber daya dan kebijakan mereka untuk lebih efektif membantu kelompok-kelompok yang rentan ini.

Tercatat bahwa capaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 5.88% dan diproyeksikan akan terus menurun hingga 4.88% di tahun 2030. Capaian ini lebih rendah dari target SDGs yang sebesar 7%. Ini menunjukkan bahwa ada upaya yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Namun, penting untuk tetap memantau tren ini untuk memastikan bahwa penurunan berkelanjutan terjadi dan bahwa target SDGs tahun 2030 dapat tercapai. Tetapi juga, angka ini masih sedikit berada di atas dari target Pemerintah melalui RPJMD yang ditetapkan sebesar 5.53%. Untuk memastikan bahwa tren penurunan kemiskinan berlanjut hingga tahun 2030, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup merinci strategi yang berhasil, mengidentifikasi potensi perubahan kondisi yang mungkin memengaruhi kemiskinan, dan menyesuaikan kebijakan secara sesuai.

2. *Gini ratio*

Rasio gini adalah salah satu ukuran ketimpangan ekonomi yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau populasi. Rasio gini berkisar dari 0 hingga 1, di mana 0 berarti kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama), dan 1 menunjukkan ketidaksetaraan sempurna (satu orang memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan dan yang lain tidak memiliki apa-apa).

Data menunjukkan bahwa rasio gini Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan rasio gini nasional. Rasio gini Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat pada tahun 2017 berada pada 0.340 poin dan meningkat 0.370 pada tahun 2022. Capaian ini masih dapat dikatakan berada pada posisi aman, dikarenakan SDGs menargetkan untuk rasio gini sebesar 0.376 poin. Namun, tren peningkatan rasio gini memproyeksikan kondisi ketimpangan akan terus terjadi hingga mencapai 0.460 poin di tahun 2030. Fenomena ini menggambarkan situasi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam lima tahun terakhir dan memberikan gambaran tentang proyeksi kondisi ketimpangan di masa depan. Kondisi ini kemudian menempatkan indikator rasio gini berada pada kategori D, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Upaya perlu dilakukan untuk memahami faktor-

faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan mengidentifikasi solusi yang tepat guna mengurangi kesenjangan.

3. Rasio total pendapatan terhadap produk domestik bruto

Proporsi pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Daerah menggambarkan sejauh mana pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah berkontribusi terhadap total nilai produksi barang dan jasa dalam daerah tersebut. PDB Daerah mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah dan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja ekonomi daerah tersebut.

Proporsi pendapatan daerah terhadap PDB Daerah dapat memberikan gambaran tentang seberapa mandiri suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber ekonomi internalnya. Jika proporsi ini tinggi, artinya daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika proporsi ini rendah, mungkin menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan atau pendapatan dari sumber ekonomi eksternal.

Proporsi atau rasio total pendapatan daerah terhadap PDB Kabupaten Bolaang Timur jika disandingkan dengan target SDGs maka masih terbilang berada pada kondisi aman, karena capaian atas indikator 17.1.1* untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 14.64% atau di atas dari apa yang ditargetkan pada SDGS yakni 11.4% – 12%. Namun jika melihat tren capaian, rasio total pendapatan terhadap PDB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus mengalami kontraksi sejak periode 2017 tercatat sebesar 24.33%, kemudian di tahun 2018 sebesar 23.02%, tahun 2019 sebesar 20.58%, 2020 sebesar 16.88%, dan 2021 sebesar 14.64%. Ini menandakan bahwa sektor-sektor penting yang selama ini mendorong pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow mulai melemah dan tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer semakin menguat, sehingga target kemandirian daerah masih sulit untuk dicapai.

Hal ini yang menyebabkan hasil proyeksi atas indikator 17.1.1* berada pada kategori E. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi rasio pendapatan daerah terhadap PDB Kabupaten Bolaang Mongondow diramalkan akan terus turun hingga mencapai 4.51%. Ini perlu diseriusi oleh pemerintah, sebab jika tidak diintervensi melalui kebijakan yang tepat sasaran, maka akan berdampak pada terjadinya resesi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dikarenakan penurunan proporsi pendapatan daerah menunjukkan bahwa ekonomi daerah

tidak beragam dan sangat bergantung pada beberapa sektor atau industri tertentu. Penurunan proporsi pendapatan daerah juga berpotensi menyulitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan dan program-program strategis lainnya. Hal ini bisa memengaruhi pembangunan jangka panjang dan daya saing daerah.

4. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto

Proporsi pajak daerah terhadap PDB daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi pajak yang dibayarkan oleh warga atau badan usaha di suatu daerah terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) dari daerah tersebut. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai jenis kegiatan ekonomi, properti, dan layanan yang ada di wilayahnya.

Tingkat proporsi pajak daerah terhadap PDB daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama, dan ini dapat menjadi pertanda baik atau buruk tergantung pada konteks dan tujuan kebijakan pemerintah. Jika proporsi ini terlalu tinggi, dapat menyebabkan beban pajak yang berat bagi warga dan perusahaan, sehingga berpotensi mengurangi daya beli konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, tingkat proporsi pajak yang lebih tinggi juga dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Di sisi lain, jika proporsi pajak daerah terhadap PDB daerah terlalu rendah, pemerintah daerah mungkin menghadapi kesulitan dalam membiayai program dan kegiatan pelayanan publik, serta menghadapi risiko ketidakstabilan pendapatan jika terjadi fluktuasi dalam ekonomi atau pendapatan dari sektor lain.

Berdasarkan hasil pemetaan kategori capaian indikator SDGs, terlihat bahwa proporsi pajak daerah terhadap PDB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diproyeksikan akan turun hingga mencapai 0.09% atau berada pada kategori E, sementara SDGs menargetkan rasio pajak atas PDB mesti berada pada range 8.41% - 8.87%. Hal ini bisa saja terjadi jika melihat tren capaian pajak daerah atas PDB Bolaang Mongondow Timur yang menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mencari keseimbangan yang tepat dalam mengenakan pajak dan memanfaatkan sumber pendapatan lainnya, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, investasi swasta, atau sumber pendapatan non-pajak lainnya. Kebijakan yang bijaksana dalam

pengelolaan pajak daerah akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah tersebut.

Peluang dan Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi

A. Prioritas Faktor Pencapaian SDGs

Prioritas kriteria pencapaian SDGs ditentukan dengan cara menetapkan empat langkah penyelesaian sesuai dengan prinsip dasar pemecahan masalah yang meliputi: *decomposition*, *comparative judgement*, *synthesis of priority*, dan *logical consistency* (Wijono, 2015).

1. *Decomposition*

Decomposition merupakan pendefinisian masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan menyederhanakan permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang lebih kecil, dan digambarkan dalam bentuk hirarki. Dalam hal ini AHP digunakan untuk menentukan bobot guna membantu memecahkan masalah kompleks melalui penentuan kriteria-kriteria yang disusun pada hirarki. Adapun terdapat 5 (lima) kriteria yang dianggap memengaruhi proses pencapaian indikator SDGs yakni dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 5.1 Model AHP Prioritas Kriteria Pencapaian SDGs

2. Comparative Judgement

Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan dengan menggunakan bentuk matriks. Mengisi matriks perbandingan berpasangan yaitu dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari satu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada setiap level hirarki terhadap suatu kriteria di level yang lebih tinggi. Apabila suatu elemen dalam matriks dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding j mendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakan sebaliknya.

Berikut ini skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya.

- a) Skala 1: Kedua elemen sama penting.
- b) Skala 3: Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lainnya.
- c) Skala 5: Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya.
- d) Skala 7: Elemen yang satu jelas sangat penting daripada elemen yang lainnya.
- e) Skala 9: Elemen yang satu mutlak sangat penting daripada elemen yang lainnya.
- f) Kebalikan: Jika elemen x mempunyai salah satu nilai di atas pada saat dibandingkan dengan elemen y , maka elemen y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen x

Untuk menghitung matriks perbandingan secara keseluruhan digunakan rata-rata geometrik (*geomean*). Nilai rata-rata dihitung menggunakan rumus rata-rata geometrik (*geometric mean*) dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Penilaian Rata-Rata Geometrik Matriks Perbandingan Kriteria

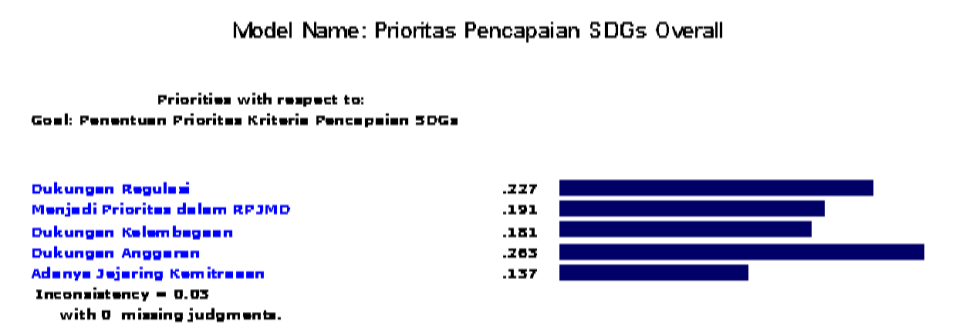
	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	1.00	0.76	1.71	0.96	1.68
RPJMD	1.32	1.00	0.72	0.72	1.23
Kelembagaan	0.59	1.39	1.00	0.51	1.57
Anggaran	1.04	1.39	1.97	1.00	1.65
Kemitraan	0.60	0.81	0.64	0.61	1.00

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil perbandingan berpasangan antar kriteria menunjukkan bahwa faktor dukungan RPJMD 1.32 kali lebih penting dibandingkan faktor regulasi. Faktor kelembagaan 0.59 kali lebih penting daripada faktor regulasi, faktor anggaran 1.04 kali lebih penting daripada faktor regulasi, dan faktor kemitraan 0.60 kali lebih penting dibandingkan faktor regulasi.

3. *Synthesis of Priority dan Logical Consistency*

Pada tahap ini dilakukan penghitungan bobot prioritas dan uji konsistensi dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 5.2 Bobot Prioritas Faktor Pendukung Pencapaian SDGs

Gambar di atas menunjukkan hasil AHP diperoleh bobot vektor prioritas dari kriteria faktor pencapaian SDGs secara keseluruhan, yaitu:

1. Dukungan anggaran (0.263).
2. Dukungan regulasi (0.227)

3. Menjadi prioritas dalam RPJMD (0.191).
4. Dukungan kelembagaan (0.181).
5. Adanya jejaring kemitraan (0.137).

Berdasarkan hasil tersebut nilai prioritas tertinggi adalah dukungan anggaran. Dari hasil tersebut, dapat diambil beberapa poin diskusi yang mendalam terkait urgensi kelima faktor tersebut dalam penanganan isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan (Gini ratio), peningkatan cakupan imunisasi dasar, dan peningkatan pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dukungan anggaran memiliki bobot tertinggi, menunjukkan bahwa aspek dukungan finansial sangat krusial dalam penanganan isu SDGs. Anggaran yang memadai dapat digunakan untuk mendukung program-program anti-kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di sisi lain, faktor dukungan regulasi mencerminkan pentingnya regulasi yang mendukung implementasi kebijakan pro-SDGs. Regulasi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan cakupan imunisasi. Selain itu, penetapan isu SDGs sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga penting sebagai bentuk komitmen dan fokus pemerintah daerah dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Faktor dukungan kelembagaan yang kuat dan efektif juga diperlukan untuk mengoordinasikan berbagai aspek penanganan isu SDGs. Dukungan kelembagaan dapat memastikan integrasi yang baik antar sektor dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung SDGs. Sementara itu, jejaring kemitraan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat diupayakan. Kemitraan yang baik dapat meningkatkan sinergi dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan SDGs, termasuk peningkatan pajak daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Prioritas Isu SDGs

Bobot skor prioritas isu merupakan hasil akumulasi antara skor rata-rata ranking isu yang dikalikan dengan bobot faktor pada gambar 5.2. Semakin kecil bobot skor isu, semakin penting isu tersebut untuk diprioritaskan. Hasil pembobotan skor isu SDGs di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara overall dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5.2 Capaian Skor Prioritas Isu SDGs

No	Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.313
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.515
3	Meningkatkan Pajak Daerah	0.536
4	Meningkatkan cakupan imunisasi dasar	0.631

Sumber: Data diolah (2024)

Data menunjukkan bahwa dari keempat isu yang teridentifikasi, prioritas terendah dengan bobot skor tertinggi adalah isu meningkatkan cakupan imunisasi dasar dengan bobot 0.631. Prioritas ketiga adalah meningkatkan pajak daerah dengan 0.536, di peringkat kedua terdapat isu mengurangi ketimpangan atau gini ratio dengan bobot 0.515, dan terakhir yang paling prioritas ada isu mengurangi tingkat kemiskinan dengan bobot 0.313. Hasil ini memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu yang dianggap memiliki prioritas tertinggi berdasarkan bobot skor yang diberikan.

1. Mengurangi tingkat kemiskinan (Bobot 0.313):
Perolehan bobot skor yang paling rendah, menandakan bahwa isu mengurangi kemiskinan tetap diakui sebagai masalah yang perlu ditangani. Urutan ini mengindikasikan bahwa isu mengurangi tingkat kemiskinan masih sangat lemah dari segi implementasi kebijakan dan membutuhkan perhatian serius. Langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan dapat melibatkan program-program bantuan sosial yang bersifat pemberdayaan serta jangka panjang, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Mengurangi ketimpangan atau gini ratio (Bobot 0.515):
Isu ketimpangan menempati peringkat kedua, menunjukkan kesadaran terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang perlu di atasi. Upaya untuk mengurangi ketimpangan dapat melibatkan

kebijakan redistribusi pendapatan, pendidikan yang lebih merata, dan peluang ekonomi yang lebih adil.

3. Meningkatkan pajak daerah (Bobot 0.536):
Peningkatan pendapatan melalui pajak daerah dapat menjadi sumber dana yang signifikan bagi pemerintah untuk mendukung program-program kesejahteraan dan pembangunan. Peningkatan pajak daerah juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.
4. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar (Bobot 0.631):
Isu ini memperoleh skor bobot tertinggi, menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dapat memiliki dampak besar pada penurunan angka penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Perolehan skor bobot tertinggi menunjukkan bahwa program peningkatan cakupan imunisasi dasar di Kabupaten Bolaangmongondow selama ini telah cukup mendapatkan penguatan dari berbagai faktor pendukung baik regulasi, perencanaan, kemitraan maupun anggaran.

Secara parsial, keempat isu tersebut diurutkan prioritasnya berdasarkan lima faktor pendukung pencapaian isu, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut;

Tabel 5.3 Prioritas Isu SDGs Berdasarkan Faktor Pendukung

No	Faktor/Isu	Bobot
Dukungan Anggaran		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.394
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.657
3	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.789
4	Meningkatkan Pajak Daerah	0.789
Dukungan Regulasi		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.397
2	Meningkatkan Pajak Daerah	0.510
3	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.624
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.737
Dukungan RPJMD		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.238
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.501
3	Meningkatkan Pajak Daerah	0.573

No	Faktor/Isu	Bobot
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.596
Dukungan Kelembagaan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.316
2	Meningkatkan Pajak Daerah	0.452
3	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.452
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.588
Dukungan Kemitraan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.222
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.342
3	Meningkatkan Pajak Daerah	0.359
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.445

Sumber: Data diolah (2024)

Data di atas mencakup skor prioritas isu Sustainable Development Goals (SDGs) berdasarkan faktor pendukung, dengan faktor-faktor tersebut termasuk dukungan anggaran, dukungan regulasi, dukungan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dukungan kelembagaan, dan dukungan kemitraan. Setiap faktor memiliki bobot prioritas isu yang menunjukkan tingkat urgensi dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs. Data menunjukkan, prioritas isu di setiap faktor memiliki kesamaan yakni isu menurunkan tingkat kemiskinan.

1. Faktor dukungan anggaran

Pada faktor dukungan anggaran, isu meningkatkan pajak daerah dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar berada pada prioritas ketiga dan keempat dengan bobot yang sama yaitu 0.789. Di urutan kedua, isu mengurangi ketimpangan memperoleh bobot 0.657 dan isu mengurangi tingkat kemiskinan ada di urutan pertama dengan bobot 0.394.

2. Faktor dukungan regulasi

Pada faktor dukungan regulasi, prioritas keempat adalah isu meningkatkan cakupan imunisasi dasar dengan bobot 0.737. Prioritas ketiga adalah isu mengurangi ketimpangan dengan bobot 0.624. Prioritas kedua adalah isu meningkatkan pajak daerah dengan bobot 0.510, sedangkan prioritas pertama adalah isu mengurangi tingkat kemiskinan dengan bobot 0.397.

3. Faktor dukungan RPJMD

Pada faktor dukungan RPJMD, yang mendapatkan bobot tertinggi atau ranking keempat adalah isu meningkatkan cakupan imunisasi

dasar yakni 0.596. Di urutan ketiga, isu meningkatkan pajak daerah memperoleh bobot 0.573. Di urutan kedua, isu menurunkan ketimpangan memperoleh bobot 0.501, dan di urutan pertama terdapat isu menurunkan tingkat kemiskinan dengan bobot 0.238.

4. Faktor dukungan kelembagaan

Pada faktor dukungan kelembagaan, isu meningkatkan cakupan imunisasi dasar berada pada urutan keempat dengan bobot 0.588. Isu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pajak daerah berada pada urutan ketiga dan kedua dengan bobot yang sama yaitu 0.452. Isu menurunkan tingkat kemiskinan berada pada urutan pertama dengan bobot 0.316.

5. Faktor dukungan kemitraan

Pada faktor dukungan kemitraan, ranking prioritas keempat adalah isu meningkatkan cakupan imunisasi dasar dengan bobot 0.445. Ketiga adalah isu meningkatkan pajak daerah dengan bobot 0.359. Kedua adalah isu mengurangi ketimpangan dengan bobot 0.342, dan pertama adalah isu menurunkan tingkat kemiskinan dengan bobot 0.222.

Ini menunjukkan bahwa terdapat poin-poin penting yang berkaitan dengan keselarasan prioritas di mana terdapat keselarasan antara faktor-faktor yang dianalisis, terutama dalam mempertahankan isu kemiskinan sebagai prioritas utama. Selain itu, memerhatikan capaian bobot masing-masing isu, kesadaran akan masalah sosial di tingkat daerah khususnya isu ketimpangan dan kemiskinan membutuhkan perhatian serius. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu fokus pada pembangunan berkelanjutan yang holistik melalui penyusunan kerangka kebijakan yang mampu mengakomodir keseluruhan isu terutama kemiskinan.

C. Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SDGs

Dalam konteks isu kemiskinan, gini ratio, cakupan imunisasi dasar, dan peningkatan pajak daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada kompleksitas regulasi, keterbatasan anggaran, serta perluasan dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dalam sektor publik maupun swasta. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kekuatan, ancaman, tantangan, dan peluang (SWOT) menjadi krusial dalam upaya merumuskan strategi dalam meningkatkan

efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mencapai target SDGs.

Pemetaan peluang, tantangan, kekuatan serta ancaman dapat dilakukan dengan baik dengan adanya dukungan hasil analisis *gap* antara harapan dan kenyataan atas implementasi faktor-faktor pendukung pencapaian target SDGs. Melalui pemahaman terhadap kesenjangan, perancangan strategi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Kesenjangan diukur menggunakan pembobotan skorsing atas masing-masing isu pada tiap faktor pendukung. Bobot gap merupakan selisih antara rata-rata skor harapan dengan kenyataan. Semakin besar nilai bobot, mengindikasikan semakin lebar *gap* antara harapan perangkat daerah dengan kenyataan atas implementasi kebijakan. Dengan membandingkan skor harapan dan skor realita, dapat diidentifikasi area di mana pencapaian SDGs telah memenuhi harapan atau bahkan melebihi, serta area di mana masih diperlukan perbaikan.

Tabel 5.4 Bobot Poin *Gap* Ekspektasi vs Realisasi Implementasi Kebijakan Pencapaian Isu SDGs

No	Faktor/Isu	Bobot Gap
Dukungan Anggaran		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	1.250
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1.750
3	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1.125
4	Meningkatkan Pajak Daerah	1.875
Dukungan Regulasi		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	1.375
2	Meningkatkan Pajak Daerah	2.125
3	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1.750
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1.375
Dukungan RPJMD		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.750
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1.500
3	Meningkatkan Pajak Daerah	1.625
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1.000
Dukungan Kelembagaan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.750
2	Meningkatkan Pajak Daerah	1.500
3	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1.250

No	Faktor/Isu	Bobot Gap
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0.750
Dukungan Kemitraan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	3.250
2	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	3.250
3	Meningkatkan Pajak Daerah	3.125
4	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	3.625

Sumber: Data diolah (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan mengenai pencapaian isu SDGs, masih terdapat kesenjangan. Uraian kesenjangan antara fakta implementasi dari masing-masing faktor adalah sebagai berikut;

a) Faktor anggaran

Pada faktor anggaran, gap terlebar ada pada isu meningkatkan pajak daerah sebesar 1.875, sedangkan gap terkecil ada pada peningkatan cakupan imunisasi dasar. Ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk program-program peningkatan pendapatan daerah masih membutuhkan intervensi yang kuat. Pemerintah dapat menciptakan kerangka kebijakan penganggaran yang mendukung program peningkatan pajak daerah secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan lokal. Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan penganggaran untuk memberi dukungan dan insentif khusus kepada UKM untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan kontribusi mereka terhadap PAD. Mendorong pengembangan sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari pajak pariwisata. Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk dikenai pajak dan promosikan pengembangan ekonomi di sektor-sektor tersebut.

b) Faktor regulasi

Sama halnya dengan faktor anggaran, isu peningkatan pajak daerah juga memiliki gap yang besar (2.125 poin) dari segi dukungan regulasi. Artinya, secara regulasi, dukungan terhadap program peningkatan pajak daerah masih lemah. Dukungan regulasi yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan dalam kebijakan pajak daerah. Kurangnya pedoman yang jelas atau kebijakan yang konsisten dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam memahami kewajiban mereka. Kurangnya dukungan regulasi juga dapat

menciptakan resistensi dari masyarakat terhadap peningkatan pajak. Jika regulasi tidak memberikan pemahaman yang cukup atau tidak adil, masyarakat cenderung menolak atau menghindari membayar pajak. Kurangnya dukungan regulasi juga mencakup masalah penegakan hukum. Jika tidak ada mekanisme penegakan yang efektif, wajib pajak mungkin merasa bahwa risiko pelanggaran pajak rendah, yang dapat merugikan pendapatan daerah.

c) Faktor RPJMD

Peningkatan pajak daerah juga memiliki gap sebesar 1.500 atau isu dengan gap tertinggi dari segi prioritas perencanaan (RPJMD). Hal ini mengindikasikan bahwa program-program yang bermuara pada peningkatan pajak daerah kurang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Terdapat ketidakselarasan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Pemerintah perlu meninjau kembali dokumen RPJMD untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang berhubungan dengan peningkatan pajak daerah diakomodir. Menganalisis sejauh mana prioritas tersebut tercermin dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

d) Faktor Kelembagaan

Secara kelembagaan, dukungan terhadap peningkatan pajak daerah juga terindikasi masih minim. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait isu peningkatan pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tinggi, menandakan perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh dalam kelembagaan pemerintah daerah khususnya OPD yang berkenaan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah. Ini melibatkan peningkatan kapasitas, perubahan regulasi yang mendukung, peningkatan keterlibatan dan pemahaman aparat daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Melalui cara ini, kelembagaan dapat menjadi pendorong utama keberhasilan dalam program peningkatan pajak daerah.

e) Faktor Kemitraan

Secara kemitraan, keseluruhan isu masih mengalami kesenjangan yang relatif tinggi. Ini membuktikan bahwa peran stakeholder baik dari sektor swasta, lembaga pendidikan, masyarakat masih minim. Guna mendorong pembangunan, pemerintah perlu memperluas peran dan keterlibatan mitra, sebab peran mitra khususnya sektor

swasta sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kesenjangan yang tinggi menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam menggali potensi pajak daerah dan investasi lokal masih minim. Perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional. Dengan mengatasi kesenjangan kemitraan ini, pemerintah dapat menciptakan iklim yang mendukung untuk investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, diketahui bahwa kesenjangan tertinggi ada pada faktor dukungan kemitraan. Implementasi pengentasan masalah pada keseluruhan isu, masih jauh dari apa yang diharapkan oleh responden dari aspek kemitraan. Fenomena ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program kemitraan yang ada dan kemungkinan perluasan atau perbaikan pada pendekatan yang diambil. Kemitraan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani masalah kompleks seperti kemiskinan dan ketimpangan. Kemitraan juga dapat menggabungkan sumber daya keuangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga donor internasional, untuk meningkatkan investasi dalam program-program pembangunan. Melalui kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam kemitraan dapat memunculkan inovasi baru dan membantu mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Mencermati tingginya kesenjangan pada aspek kemitraan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kemitraan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan kolaborasi sektor swasta. Dengan meningkatkan dukungan kemitraan dan memastikan kolaborasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Boltim dapat lebih baik mengatasi masalah-masalah kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan, imunisasi, dan pendapatan, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Mengacu pada uraian tersebut, maka kerangka SWOT yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut;

1. *Strengths* (kekuatan)
Cakupan imunisasi dasar memiliki bobot skor tertinggi (0.631), menandakan dukungan pemerintah daerah terhadap isu ini sudah relatif baik dan berkelanjutan sehingga kebijakan ke depan, Pemerintah dapat berfokus untuk mengintervensi pencapaian isu lain yang selama ini kurang mendapat porsi lebih dalam kebijakan.
2. *Weakness* (kelemahan)
 - a) Prioritas rendah pada dukungan kelembagaan (0.181) dan dukungan kemitraan (0.137), mengindikasikan dua faktor ini membutuhkan perhatian ekstra karena dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pencapaian SDGs.
 - b) Isu prioritas yang berkaitan dengan program-program peningkatan pajak daerah belum terakomodir dalam dokumen perencanaan (RPJMD) secara komprehensif, ini menunjukkan bahwa penekanan pada isu-isu tertentu mungkin kurang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah.
3. *Opportunities* (peluang)
 - a) Faktor dukungan anggaran memberikan peluang untuk alokasi dana yang lebih besar pada isu-isu seperti meningkatkan pajak daerah dan penanggulangan kemiskinan.
 - b) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung oleh potensi pertanian, wisata, dan alam yang baik dan berpotensi untuk menambah pundi keuangan daerah jika dikelola dengan baik.
4. *Threats* (ancaman)
 - a) Isu-isu dengan ranking terendah dalam faktor dukungan kemitraan dan kelembagaan menjadi penghambat karena kurangnya dukungan dan kolaborasi dari pihak eksternal.
 - b) Adanya perbedaan prioritas antara faktor dukungan anggaran dan regulasi dapat menciptakan potensi konflik dalam alokasi sumber daya.

Kerangka ini memperlihatkan bahwa isu prioritas seperti mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pajak daerah menghadapi kendala dalam dukungan kemitraan dan kelembagaan. Sementara itu, meningkatkan pajak daerah memiliki potensi dari segi dukungan anggaran namun perlu perhatian lebih pada aspek dukungan dokumen perencanaan (RPJMD) dan butuh penguatan melalui

perluasan kemitraan. Kerangka ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan prioritas yang telah ditetapkan.

BAB 6

Penutup

Dalam upaya mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah telah menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang tidak terhindarkan. Melalui kesungguhan dan kolaborasi semua pihak, Pemerintah telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek pembangunan yang diperlukan untuk mencapai SDGs. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat di wilayah ini dapat menikmati kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

Pentingnya memastikan inklusivitas dalam pembangunan menjadi fokus utama bagi pemerintah dan semua pihak terkait. Setiap kebijakan dan program harus dirancang dengan memperhitungkan keberagaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, pengentasan kemiskinan menjadi isu prioritas utama dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan infrastruktur yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini tentu perlu dukungan kuat baik secara kelembagaan, regulasi, perencanaan, penganggaran maupun kemitraan. Kelima faktor pendukung ini menjadi kunci utama dalam mengejar target SDGs Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sebagai faktor dengan tingkat kesenjangan yang tinggi, dukungan kemitraan menjadi aspek yang perlu diseriusi oleh Pemerintah Daerah. Peran sektor publik maupun swasta tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dukungan dari sektor ini dalam hal investasi, teknologi, dan inovasi akan sangat

meningkatkan efektivitas dari upaya pencapaian target SDGs. Diperlukan strategi yang progresif dan implementasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil menuju SDGs memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan. Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi dalam mencapai target SDGs tidaklah mudah, namun dengan kesungguhan dan kerja keras semua pihak, setiap rintangan yang muncul dapat dihadapi dengan optimisme dan komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang berkesinambungan, cita-cita untuk menciptakan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka Tahun 2023. Bolaang Mongondow Timur: BPS.
- Hoelman, Mickael B. et. al. 2015. "Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah". Jakarta : INFID.
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2022. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden RI No. 59, Tahun 2017. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). Sustainable Development Report 2019: Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
- United Nations General Assembly. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
- United Nations. (2012). The Future We Want: Outcome document adopted at Rio+20. United Nations.
- Wijono, Djoko., Idham, Ibty. (2015). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Pengambilan Keputusan Penentuan Prioritas Program Kerja Dompok Dhuafa Yogyakarta. Telaah Bisnis, Volume 16, Nomor 1, Juli 2015.

INDEKS

	D	Pupuk, 17	
Danau, 3			R
	E	Ratifikasi, 31	
Evaluasi, 67		Retribusi, 70, 71, 74	
	K		S
Komoditas, 15		SDGs, 1, 3, 4, v, vi, viii, ix, 1, 2, 3,	
	M	4, 5, 6, 17, 35, 36, 38, 40, 48,	
MDGs, 1, 5, 6, 7, 9, 14, 25, 39		77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,	
Mikronutrien, 14		87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,	
	N	96, 97, 98, 101, 103, 104, 105	
		Stunting, 14	
			T
	P	Teluk, v, 2, 4, 41	
Prevalensi, 14, 20, 21, 24			

PROFIL PENULIS